

## Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen

Meliza<sup>1</sup>, Siraj<sup>2</sup>, Zahriyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia

<sup>1</sup>[mmel65794@gmail.com](mailto:mmel65794@gmail.com)

<sup>2</sup>[siraj@unimal.ac.id](mailto:siraj@unimal.ac.id)

<sup>3</sup>[zahriyanti\\_zubir@yahoo.co.id](mailto:zahriyanti_zubir@yahoo.co.id)

---

### ABSTRAK

Implementasi Kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan saat ini untuk semua satuan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam berbagai bidang di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebanyak 236 SD sudah mandiri berubah, dan 9 SD menjadi Sekolah Penggerak di Kabupaten Bireuen. Namun permasalahannya pemahaman guru masih rendah terkait teknologi informasi, guru belum memiliki kesiapan untuk menghadapi era digital saat ini untuk implemetasi kurikulum merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, (2) Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, (3) Mendeskripsikan evaluasi manajemen implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bersifat kajian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dilaksanakan pada SD di Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, yaitu: upaya ketersediaan sumber daya, diantaranya: tenaga pendidik dan staf, bahan ajar dan materi pembelajaran, infrastruktur dan fasilitas, teknologi dan perangkat, anggaran, partisipasi orang tua dan masyarakat, evaluasi dan monitoring, pengembangan kurikulum lokal, kerja sama dengan pihak terkait, komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*. (2) Pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen: memiliki visi dan komitmen yang jelas, memiliki program pengembangan rencana dan strategi, memiliki program pelatihan dan pengembangan guru, melakukan pemantauan dan evaluasi, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, melibatkan orang tua dan masyarakat, melakukan penyelesaian masalah, pengambilan keputusan sangat informatif dan terbuka. (3) Evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, yaitu: identifikasi tujuan evaluasi, mengumpulkan data yang relevan, menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, membuat perencanaan tindakan perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, melakukan evaluasi lanjutan, melakukan kolaborasi terus-menerus, melaksanakan pemantauan yang berkesinambungan, dan melakukan publikasikan hasil

**Kata Kunci:** Implementasi, Manajemen, Kurikulum Merdeka



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

### Penulis Korespondensi:

Meliza

Universitas Almuslim

Jl. Medan - Banda Aceh, Matangglumpangdua, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh

[mmel65794@gmail.com](mailto:mmel65794@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pendidikan dari tahun ketahun terus mengalami perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Salah satu permasalahannya adalah di bidang pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu masih rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang di satuan pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, salah satunya dengan melakukan penyempurnaan kurikulum, (Hidayat, 2019: 28).

Saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar untuk para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran, karenanya, pemerataan akses teknologi menjadi keniscayaan. (Alam, 2020: 16)

Menurut Erlangga (2020: 41), Merdeka Belajar merupakan sebuah gebrakan baru untuk dapat merubah sistem pendidikan nasional yang selama ini terkesan monoton. Dalam Merdeka Belajar guru dan

siswa diberikan kepercayaan secara penuh dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2021: 11). Kehadiran Kurikulum Merdeka Belajar melahirkan empat pokok kebijakan, diantaranya: (1) penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), (2) mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional, (3) penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan (4) penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih fleksibel.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sedang diterapkan saat ini untuk semua satuan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas dalam berbagai bidang di masa depan. Beberapa program yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Program tersebut akan memberikan dukungan mendapatkan pengalaman yang baik, sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dengan baik di sekolah.

Adanya program IKM, diharapkan mampu merubah sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Guru dan siswa diberikan kepercayaan secara penuh dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2021: 39). Merdeka tidak memiliki makna sebebaskan-bebasnya dalam menjalankan aktivitas pengajaran tanpa kontrol akademik. Merdeka belajar artinya kemerdekaan dan kemandirian bagi lingkungan pendidikan dalam menentukan sendiri metode terbaik dalam proses pembelajaran. Melalui konsep merdeka belajar sekolah/madrasah diberikan hak memajukan pola orientasi pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai dengan keperluan yang terjadi di publik berlandaskan sajian kurikulum nasional, (Zuhaidi, 2023: 31).

Saat ini di Kabupaten Bireuen Sekolah Dasar (SD) berjumlah sebanyak 236 sekolah yang sudah mandiri berubah. Mandiri berubah merupakan sekolah yang sudah mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta memberikan keleluasaan untuk menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada tingkat sekolah Dasar (SD), sedangkan jumlah sekolah penggerak berjumlah sebanyak 9 sekolah di tingkat SD. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan profil pelajar pancasila, mencakup kompetensi dan karakter SDM terbaik.

Namun permasalahannya adalah dalam penerapan IKM pemahaman guru masih rendah terkait teknologi informasi, guru belum memiliki kesiapan untuk menghadapi era digital saat ini. Pelatihan untuk guru yang berkaitan dengan pengimplementasian dan pemanfaatan teknologi informasi masih sangat minim pelaksanaannya, selain itu sarana dan prasarana masih kurang mendukung terhadap implementasi kurikulum merdeka. Sedangkan dalam program merdeka belajar, guru dituntut untuk kreatif, inovatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang semakin canggih sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Hamdani, selaku kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen menyatakan bahwa untuk implementasian Kurikulum Merdeka masih belum terlaksana dengan baik, karena terkendala dengan beberapa faktor diantaranya: kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi, masih banyak guru yang kurang memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun pelatihan kepada guru-guru tentang kurikulum merdeka. Pelatihan hanya diikuti oleh beberapa perwakilan guru saja. Sedangkan jumlah keseluruhan guru kelas I dan IV ada enam orang. Untuk guru yang tidak mengikuti pelatihan tersebut harus belajar secara mandiri ataupun berguru kepada guru yang sudah mengikuti pelatihan, namun hal tersebut tidak efektif, karena guru yang sudah mengikuti pelatihan terbatas waktunya untuk berbagi ilmunya, (Wawancara: 03 Oktober 2022).

Sedangkan hasil observasi peneliti di lapangan terlihat bahwa di UPTD SD Negeri 18 Bireuen, belum sepenuhnya siap mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun sejak awal pihak sekolah memberanikan diri mendaftar untuk menjadi salah satu sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah yaitu ada beberapa kendala, diantaranya pemahaman guru masih kurang tentang teknologi informasi, dan pemahaman guru tentang implemetasi kurikulum Merdeka juga masih sangat minim, misalnya TP, ATP, modul ajar, profil pelajar Pancasila, dan KOSP, selain itu kesadaran guru untuk berliterasi juga masih kurang, sarana prasarana masih kurang mendukung, dan pengelolaan waktu yang kurang optimal. (Observasi: 03 Oktober 2022).

Hasil wawancara dan observasi di atas merupakan dua sekolah yang menjadi tempat penelitian yang peneliti lakukan, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, kenyataannya masih banyak kendalanya. Kendala tersebut berasal dari dalam diri guru yang bersangkutan maupun dari sekolah. Berbagai kendala tersebut di antaranya terkait dengan minimnya kemampuan guru menggunakan teknologi informasi, dan pemahaman guru tentang implemetasi kurikulum Merdeka masih sangat kurang, serta sarana prasarana yang kurang mendukung, misalnya sulitnya akses digital atau internet juga menjadi kendala guru mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jaringan internet yang tidak stabil akan menyulitkan guru mengakses materi yang menjadi sumber belajar. Bahkan beberapa sekolah masih ada yang belum memiliki fasilitas digital dan internet yang memadai.

Kenyataan di atas, sangat kontradiksi antara harapan dengan kenyataan, harapannya bahwa implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan maksimal, namun kenyataannya guru, sekolah dan pemerintah daerah kurang memiliki kesiapan. Seharusnya kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka memiliki kesiapan yang matang, dengan melibatkan berbagai unsur untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi, terhadap peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, dan berkualitas. Dalam menjalankan merdeka belajar diperlukan manajemen tata kelola dari segala unsur yang profesional dan handal dibidangnya, baik pemerintah daerah, swasta, kepala sekolah, pengajar, serta publik turut serta mendukung atas kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marliyani, dkk, (2022), menjelaskan adanya Kurikulum Merdeka menjadi acuan di sekolah penggerak, menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, rasa kebinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifa (2020: 60), bahwa IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19 memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, *mindset* pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan tersebut.

Fyanto (2021: 7), menunjukkan bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar pada kurikulum SMK dengan melaksanakan sistem pendidikan pada ranah *input*, proses, dan *output*, hambatan: memerlukan peningkatan kompetensi guru yang terprogram, guru belum mempunyai pengalaman lapangan, perubahan standar kompetensi yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana prasarana, kesulitan memfasilitasi pembelajaran dengan efektif sesuai dengan budaya, upaya untuk mengatasi kendala yang ada dari penerapan merdeka belajar adalah membuat program kesepakatan kerjasama, mengembangkan metode pembelajaran yang mampu menciptakan nuansa kerja, sinkronisasi kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru dalam konteks pemenuhan harapan.

Sedangkan Rasino (2022: 2), menunjukkan bahwa implementasi merdeka belajar dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya diawali pembuatan kurikulum operasional sekolah dalam pembelajaran, melaksanakan modul rencana pembelajaran yang telah dibuat serta menggunakan metode *literasi* dan *steam* serta memakai media *looseparts*. Hasilnya anak-anak lebih bebas menentukan media, kegiatan, dan kreativitasnya serta tidak terikat pada instruksi guru. Sehingga anak antusias dalam belajar karena belajar dengan cara yang menyenangkan.

Menurut Sumersih, dkk (2022: 1) bahwa Kurikulum Merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Memupuk kerja sama dengan guru-guru yang mendukung pemimpinnya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak. Berbeda halnya hasil penelitian Dewi, dkk (2022: 1), bahwa kendala penerapan IKM yaitu sering bergantinya regulasi, belum meratanya pelatihan pada guru, belum lengkapnya sarana dan prasarana, guru belum memahami substansi Kurikulum Merdeka, guru masih kesulitan dalam menyusun RPP. Sedangkan permasalahan yang dihadapi siswa yaitu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang, siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru, butuh waktu untuk menjadi aktif mencari dan mempelajari materi.

Berdasarkan teori dan beberapa hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi manajemen Kurikulum Merdeka ada yang berjalan dalam pelaksanaannya, dan ada juga yang terkendala dalam pelaksanaannya. Implementasi pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya. Menurut Edwards dalam Subianto (2020: 70) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Sedangkan menurut Webster implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu (Subianto, 2020: 71).

Dye dan Jonnes dalam Mustari (2015: 36) implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Sebatiar dan Mazmania dalam Subianto (2020: 540) implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan. Menurut Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan (Subianto, 2020: 73).

Edwards III menambahkan implementasi dipandang sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau implikasi (*output*,

*outcome*) yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (Subianto, 2020: 75). Menurut Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan, dan berhubungan dengan upaya mentransformasikan atau menterjemahkan pernyataan-pernyataan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam program dan tindakan konkrit, membentuk staf organisasi yang bertugas memberikan manfaat dan pelayanan terhadap kelompok sasaran serta memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan (Subianto, 2020: 78).

Sedangkan menurut Jones (2019: 101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Salah satu model implementasi program yakni model yang dikembangkan oleh David C. Korten, memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program, tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi manajemen program, (1) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, (2) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, (3) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2020: 12).

Pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dari uraian di atas menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasi manajemen Kurikulum Merdeka di sekolah, namun tidak dinafikan bahwa ada juga keberhasilan dalam mengimplementasikannya dengan berbagai dukungan yang dimiliki oleh sekolah. Berdasarkan latar belakang, teori dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen”**

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Hakikat Implementasi

#### 2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Dalam kehidupan kemanusiaan penting halnya menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu sebenarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan kehidupan ini tentunya membutuhkan bekal agar bisa bersosial kemasyarakatan. Bekal yang dibutuhkan adalah Penerapan dan pengamalan yang berupa perbuatan, perkataan, sikap dan karakter. Kegiatan penerapan ini dapat disebut sebagai implementasi. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan dan penerapan (Darmadi, 2020: 29).

Sebelum terjadinya proses implementasi diperlukan sebuah konsep yang ideal agar implementasi yang dilakukan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan sang pembuat kegiatan. Asal muasal implementasi yaitu berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang dapat diartikan sebagai pengimplementasian. Implementasi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang tidak hanya aktivitas (Fauzan & Adiputri, 2020: 63).

Menurut Edwards III dalam Subianto (2020: 70) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik, dengan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi adalah juga sebuah konsep yang ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing-masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola *input*. Meter dan Horn (Subianto, 2020: 74) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Menurut Hamalik (2020: 104) bahwa “Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap”. Implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam *oxford advance learner's dictionary* sebagai mana yang dicatat oleh Hamalik (2020: 107) “implementasi adalah “*put something into effect*” atau penerapan sesuatu yang memberikan efek.

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Abdullah, (2019: 17), mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*impending conditions*). Pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
- b. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “*outcomes*” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- c. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu:
  - 1) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
  - 2) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
  - 3) Adanya program yang dilaksanakan. Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Penerapan implementasi haruslah dipersiapkan dengan perencanaan yang ideal sejak dini agar penerapannya nanti dapat bertahan dengan waktu yang lama implementasi sendiri hanya dapat diterapkan sesudah adanya rencana dan persiapan yang matang dan bukan hanya sekedar tindakan semata saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan implementasi harus sistematis dan terikat oleh mekanisme guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan dari implementasi tentunya membutuhkan sebuah konsep. Sebelum implementasi dibuat hal yang terpenting adalah desain atau menggambar implementasi dengan melihat berbagai kemungkinan yang terjadi baik kemungkinan positif maupun kemungkinan negatifnya, (Daniel & Budi, 2018: 2).

Implementasi merupakan aktivitas yang sudah direncanakan secara matang sebelum diterapkan secara langsung. Aktivitas ini tentunya membutuhkan acuan di dalam penerapannya. Acuan yang sangat cocok adalah norma-norma yang sesuai dengan tujuan implementasi. Pelaksanaan aktivitas yang sudah direncanakan secara matang merupakan bentuk suatu tindakan dan aksi yang nyata bagi terwujudnya implementasi. Implementasi berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen kurikulum merdeka, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, baik pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan untuk melaksanakan kurikulum merdeka.

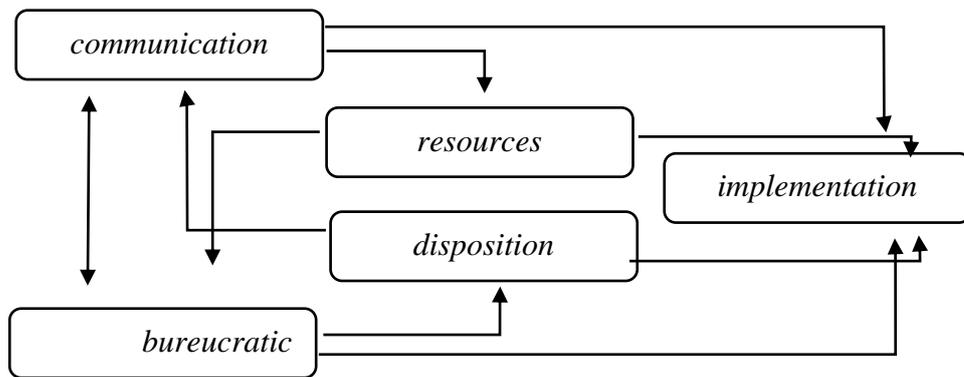
#### 2.1.2 Model-Model Implementasi

##### 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun yang peneliti fokus pada model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. George Edward dalam Subianto (2020: 76) melihat implementasi

kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: (1) apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? (2) apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.



**Gambar 2.1**  
**Model Implementasi George C. Edward III**

Edwards III untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat indikator (Subianto, 2020: 78), yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi *implementor* dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka *implementor* tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

2. Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle (Subianto, 2020: 47) dikenal dengan implementasi *as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang mana pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai yang dimana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu: a) Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Grindle ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*) a). Isi kebijakan: (1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, (2) Tipe manfaat, (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, (6) Sumber-sumber daya yang diinginkan. b). Konteks/lingkungan kebijakan: (1). Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) Karakteristik atau rezim yang berlaku, (3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Menurut Grindle (Subianto, 2020: 48), indikator perencanaan manajemen implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa elemen penting. Grindle adalah seorang ahli ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam studi kebijakan publik dan administrasi di negara-negara berkembang, telah melakukan penelitian yang signifikan tentang implementasi kebijakan dan membagikan pandangannya tentang indikator yang relevan dalam konteks tersebut. Berikut ini adalah beberapa indikator perencanaan manajemen implementasi kebijakan menurut Grindle, yaitu:

- a. Ketersediaan Sumber Daya. Indikator ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan dana, personel, infrastruktur, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan,
- b. Koordinasi Antar instansi. Indikator ini mencerminkan tingkat koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi atau departemen yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi hambatan dan mempromosikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan,
- c. Penguatan Kapasitas. Indikator ini menyoroti upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi atau individu dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dapat melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, transfer pengetahuan, dan upaya lainnya untuk memperkuat kemampuan yang diperlukan untuk implementasi yang sukses,
- d. Pengukuran Kinerja. Indikator ini berkaitan dengan upaya untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, baik dalam hal hasil yang dicapai maupun proses yang digunakan. Pengukuran kinerja yang akurat dan terukur dapat memberikan informasi berharga tentang efektivitas implementasi dan membantu dalam penyesuaian strategi jika diperlukan,
- e. Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Indikator ini mengacu pada partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dapat membantu memastikan dukungan dan pemahaman yang lebih besar terhadap kebijakan, serta membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi,
- f. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi. Indikator ini mencakup sistem monitoring dan evaluasi yang dirancang untuk memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Mekanisme yang baik untuk monitoring dan evaluasi merupakan elemen penting dalam manajemen implementasi kebijakan.

Penting untuk dicatat bahwa indikator perencanaan manajemen implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan sifat kebijakan yang diimplementasikan. Namun, pandangan Grindle ini memberikan gambaran umum tentang elemen-elemen yang relevan.

Menurut Grindle (Subianto, 2020: 49), indikator pelaksanaan manajemen implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa indikator pelaksanaan manajemen implementasi kebijakan menurut pandangan Grindle:

- a. Kecepatan Pelaksanaan. Indikator ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan cepat. Kecepatan pelaksanaan menjadi penting karena semakin lama kebijakan tertunda, semakin besar kemungkinan terjadinya kendala atau perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan,
- b. Konsistensi Implementasi. Indikator ini mencerminkan konsistensi dalam menerapkan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan atau unit pelaksana. Konsistensi yang baik dalam implementasi kebijakan akan membantu mencegah adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif antara kelompok atau wilayah yang berbeda,
- c. Dukungan Kepemimpinan. Indikator ini berkaitan dengan tingkat dukungan dan komitmen dari para pemimpin dan pejabat pemerintah terhadap implementasi kebijakan. Dukungan yang kuat dari pihak yang berwenang akan memberikan motivasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan,
- d. Partisipasi Masyarakat. Indikator ini mencakup tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memperhitungkan kebutuhan dan perspektif mereka, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut,

- e. Kapasitas Pelaksana. Indikator ini menyoroti kemampuan dan keterampilan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kapasitas pelaksana yang memadai meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif,
- f. Koordinasi Antarinstansi. Indikator ini melibatkan tingkat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi atau departemen yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi hambatan, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan,
- g. Monitoring dan Evaluasi. Indikator ini mencakup mekanisme yang digunakan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Monitoring yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.

Berikut adalah beberapa indikator evaluasi implementasi kebijakan menurut pandangan Grindle (Subianto, 2020: 47), yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan. Indikator ini menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan melihat apakah kebijakan telah menghasilkan dampak yang diharapkan dan mencapai hasil yang diinginkan,
- b. Efektivitas Pelaksanaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Evaluasi akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana, apakah langkah-langkah pelaksanaan telah efektif, dan apakah sumber daya yang diperlukan tersedia,
- c. Efisiensi Pelaksanaan. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Evaluasi akan menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- d. Kesetaraan atau Keadilan. Indikator ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan diterapkan secara adil dan merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi akan melihat apakah kebijakan menyebabkan ketimpangan atau diskriminasi yang tidak adil dalam pelaksanaannya.
- e. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat. Indikator ini mengevaluasi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Evaluasi akan melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan apakah mereka memiliki akses yang memadai ke informasi dan mekanisme partisipasi.
- f. Dampak Sampingan atau Efek Tidak Terduga. Indikator ini melibatkan evaluasi terhadap dampak sampingan yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan. Evaluasi akan mengidentifikasi efek tidak terduga yang muncul selama pelaksanaan kebijakan dan mencari tahu apakah ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dampak tersebut.
- g. Keberlanjutan. Indikator ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan dapat dipertahankan dan berlanjut setelah periode implementasi awal. Evaluasi akan melihat apakah ada rencana jangka panjang dan sumber daya yang memadai untuk menjaga kelangsungan kebijakan setelah pelaksanaan awal.

Pandangan Grindle ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk mengevaluasi implementasi kebijakan. Namun, perlu dicatat bahwa indikator evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sifat kebijakan yang sedang dievaluasi.

### 3. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikenal oleh Donal van Meter dan Carl van Horn adalah *A Model of The Policy Implementation*. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perforansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Donal van Meter dan Carl van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni: (a) Ukuran dan tujuan kebijakan, (b) Sumber daya, (c) Karakteristik agen pelaksana, (d) Sikap/kecenderungan para pelaksanan (disposisi implementasi), (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

### 4. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Jones (2019: 199) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni:

#### a. Organisasi

Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian (*organization*), merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing- masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

b. Interpretasi atau Pemahaman

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (*Interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

Sejalan dengan pemikiran ini, Abidin (2021: 199) juga menggambarkan tentang suatu sistem kejiwaan (*behavior*) dari kebijakan yang berhubungan dengan pemahaman pelaksanaan maupun sasaran tentang kebijakan yang pada akhirnya dapat menerima atau menolak kebijakan tersebut. Pengaruh faktor kejiwaan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari substansi itu sendiri.

Disamping itu pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan penyampaian serta cara melaksanakan suatu kebijakan. Interpretasi dalam kaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan mengangkut pemahaman mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan dengan kebijakan tersebut.

c. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Sejalan dengan Abidin (2021: 199) mengemukakan juga tentang keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan *procedural*, yang berupa langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan prosedur tersebut, maka yang terpenting dalam implementasi adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk pelaksana kebijakan.

## 2.2 Konsep Manajemen

### 2.2.1 Pengertian Manajemen

Kata manajemen biasanya identik dengan bisnis dan diajarkan dalam kegiatan ekonomi. Padahal bila ditelisik lebih jauh manajemen bisa masuk dalam banyak kegiatan. Hal ini dikarenakan manajemen itu memerlukan suatu perencanaan, pengelompokan, aktivitas, bahkan ada pengawasannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara aktif untuk mencapai sasaran, atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Sugono, 2018: 870).

Menurut Terry, (2019: 21) bahwa manajemen merupakan istilah yang menggambarkan proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai sasaran yang diimplementasikan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Bangun, manajemen adalah rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuannya.

Parah ahli yang lain seperti Stoner, (2016: 1-2), mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Taylor, (2019: 4) mendefinisikan manajemen adalah mengetahui secara tepat apa yang anda ingin kerjakan dan anda melihat bahwa mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik dan murah. Follet (2019: 51), menyatakan bahwa manajemen sebagai kiat atau seni dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sesuatu melalui bantuan orang lain.

Menurut Suhardan, (2019: 87), manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Martayo (2019: 13) mengemukakan bahwa manajemen adalah usaha untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahannya, dan kepemimpinan serta pengawasan.

Menurut Kartono (2018: 48) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen dapat disebut pula sebagai proses pendelegasian/pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggungjawab dengan tugas-tugas kepemimpinan, atau proses penggerakan serta bimbingan pengendalian semua sumber daya manusia dan sumber material dalam kegiatan mencapai sasaran.

Meskipun cenderung mengarah pada satu fokus tertentu, para ahli masih berbeda pendapat dalam mendefinisikan manajemen, karenanya belum dapat diterima secara universal. Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian

tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen oleh seorang manajer/pemimpin.

Berdasarkan beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni mengelola sumber daya seperti perencanaan, mengorganisasi, pergerakan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi dibawah bimbingan dan arahan seorang manajer kepada bawahannya.

Sedangkan manajemen sekolah sebagai terjemahan dari *school management* adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen Sekolah merupakan sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan ditingkat lokal (*local stakeholders*), (Fattah, 2019: 11).

Manajemen Sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, dengan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah, (Prangbakat, 2021: 13).

Menurut Arikunto, (2020: 72), manajemen sekolah menata sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah, atas kesiapan seluruh staf sekolah, untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas belajar yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Manajemen sekolah dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu, (Danim, 2018: 34).

Satori (2019: 45) memberikan pengertian manajemen sekolah dengan menggunakan istilah administrasi sekolah yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Antara administrasi sekolah dan manajemen sekolah dapat dipandang secara esensial dari tiga sudut pandang yakni sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai suatu proses kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen sekolah merupakan proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian dengan lebih efektif dan efisien. Dari fungsi perencanaan sekolah tentunya diawali dari penentuan visi, misi dan tujuan sekolah yang telah dirancang dan dikembangkan pada setiap tahun ajaran baru.

#### 2.2.2 Tujuan Manajemen Sekolah

Subakir (2001: 67) tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Adapun menurut Mulyasa (2021: 25) tujuan manajemen sekolah adalah:

- a. Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi,
- b. Peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
- c. Peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Manajemen sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Secara rinci, tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001: 5) adalah:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama,
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah,
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Pakar ilmu pendidikan Soelaeman, dalam Depdiknas menyatakan bahwa manajemen sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumberdaya manusianya, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan sumberdaya manusia ini melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan pemberian tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen sekolah bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, dengan partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi yang ada.

### 2.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Sekolah

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah: perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan, (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. (Fattah, 2020: 19). Hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yakni, adanya *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC), (Muhsin, 2019: 22) yaitu:

- a. Perencanaan (*planning*): yaitu merencanakan setiap kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam merencanakan sebuah kegiatan, hendaknya mengetahui kemampuan yang dimilikinya, baik tenaga, biaya ataupun sarana dan fasilitas. Selain itu, perlu diperhatikan apakah sebuah kegiatan yang direncanakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan atau tidak. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam membuat sebuah perencanaan yaitu:
  - 1) Menetapkan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kebutuhan organisasi. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan dayanya secara tidak efektif. Kegiatan yang tidak secara langsung menjurus tujuan yang telah ditetapkan, pada dasarnya adalah sebuah pemborosan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam rencana kegiatan majelis taklim
  - 2) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber yang tersedia untuk tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Analisa rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.
  - 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan, kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
  - 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut adalah pemilihan alternatif terbaik.
- b. Pengorganisasian (*organizing*): yaitu mengatur atau mengorganisasikan semua tenaga, biaya dan sarana yang dimiliki. Termasuk di dalamnya adalah pembagian tugas antar pengurus, pengaturan tempat, pengaturan pengajaran dan pengaturan biaya (keuangan). Menurut Handoko, (2022: 24) pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
  - 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal tujuan.
  - 3) Penugasan tanggung jawab tertentu,
  - 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Aksi/tindakan (*actuating*): yaitu menyelenggarakan atau melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disepakati dalam tindakan nyata sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan ini harus benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karenanya, dibutuhkan semangat dan kemampuan pengurus agar program atau kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan dan tujuan semula.
- d. Pengawasan (*controlling*): yaitu mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan dan semua penggunaan dana dan sarana (fasilitas) untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan lembaga untuk mencapai tujuan secara optimal.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa fungsi manajemen sekolah adalah sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dengan segala aspeknya, agar tujuan organisasi sekolah tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi sekolah.

### 2.2.4 Unsur-Unsur Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dengan satu sama lain, yaitu:

a. Manusia (*Man*)

Manusia merupakan sarana penting dan utama dalam setiap manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan berbagai kegiatan seperti yang terdapat dalam fungsi manajemen memerlukan adanya sumber daya manusia untuk menjalankannya. Begitu juga halnya di lembaga pendidikan sekolah, seperti ada kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru dan peserta didik. Semuanya memiliki peran masing-masing di lembaga pendidikan sekolah, itulah beberapa unsur manajemen sekolah yang berkaitan dengan manusia.

b. Uang (*Money*)

Uang selalu dibutuhkan dalam lembaga pendidikan sekolah, mulai dari pendirian sekolah, oprasional sekolah, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, uang sebagai sarana manajemen sekolah harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kelancaran atau ketidaklancaran proses manajemen sekolah sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik.

c. Metode (*Method*)

Metode sangat penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode cara dalam menjalankan pekerjaan sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

d. Bahan-bahan/perlengkapan (*Material*)

Bahan-bahan/perlengkapan dianggap sebagai alat atau sarana manajemen, karena dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu juga halnya di lembaga pendidikan sekolah materil merupakan hal yang penting untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas.

d. Mesin-mesin (*Machines*)

Mesin memegang peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan penggunaan mesin semakin menonjol. Hal ini karena banyaknya mesin-mesin baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Begitu juga halnya dalam bidang pendidikan, mesin diibaratkan sebagai tenaga pendidik, tanpa ada tenaga pendidikan mustahil berjalannya proses pembelajaran.

e. Pasar (*Market*)

Pasar merupakan tempat kita memasarkan produk yang telah diproduksi. Pasar sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Pasar tersebut berupa masyarakat (pelanggan) itu sendiri. Tanpa adanya pasar suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan harus memikirkan manajemen pasar (pemasaran) yang baik, agar distribusi produk dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam bidang pendidikan, membuka jurusan tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga setelah lulus nantinya tidak menjadi pengangguran.

f. Informasi (*Information*)

Informasi sangat dibutuhkan dalam suatu sekolah, baik informasi apa yang sedang populer, disukai, dan terjadi di masyarakat. Adanya informasi tersebut dapat membantu sekolah dalam menganalisis peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkemajuan (Arsyad, 2020: 36).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen sekolah memiliki unsur-unsur yaitu *man* (manusia), *material* (barang), *machine* (mesin), *money* (uang) *method* (metode) *market* (pasar), *minut* (waktu) untuk pencapaian proses pendidikan di sekolah.

### 2.2.5 Prinsip-Prinsip Manajemen Sekolah

Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia.

- a. Prinsip Ekuifinalitas (*principle of equifinality*). Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing.
- b. Prinsip Desentralisasi (*principle of decentralization*). Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
- c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*principle of self-managing system*). Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah.

- d. Prinsip Inisiatif Manusia (*principle of human initiative*). Berdasarkan perspektif ini maka Manajemen Sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis (Nurkolis, 2019: 2).

Menurut Usman, (2021: 28) prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah antara lain sebagai berikut:

- a. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber manajemen sekolah,
- b. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber manajemen sekolah,
- c. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak,
- d. Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif,
- e. Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan,
- f. Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum,
- g. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana,
- h. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan *stakeholders* sekolah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan secara umum, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Sedangkan secara khusus memiliki prinsip, yaitu prinsip komitmen, prinsip kesiapan, prinsip keterlibatan, prinsip kelembagaan, prinsip keputusan, prinsip kesadaran, prinsip kemandirian, dan prinsip ketahanan.

#### 2.2.6 Karakteristik Manajemen Sekolah

Menurut Danim, karakteristik ideal manajemen berbasis sekolah dan karakteristik ideal sekolah untuk abad ke-21 (*school for the twenty-first characteristics*), seperti berikut ini:

- a. Adanya keragaman dalam pola pengajian guru, istilah populernya adalah pendekatan prestasi (*merit system*) dalam hal pengajian dan pemberian aneka bentuk kesejahteraan material lainnya,
- b. Otonomi manajemen sekolah. Sekolah menjadi sentral utama manajemen pada tingkat strategis dan operasional dalam kerangka penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran,
- c. Pemberdayaan guru secara optimal, dikarenakan sekolah harus berkompetisi membangun mutu dan membentuk citra di masyarakat guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermakna.
- d. Pengelolaan sekolah secara partisipatif. Kepala sekolah harus mampu bekerja dengan dan melalui seluruh komunitas sekolah agar masing-masing dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara baik dan terjadi transparansi pengelolaan sekolah.
- e. Sistem yang didesentralisasikan, di bidang penganggaran misalnya, pelaksanaan manajemen sekolah mendorong sekolah-sekolah siap berkompetisi untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau dari pemerintah secara kompetitif (*block grant*) dan mengelola dana itu dengan baik.
- f. Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan. Program akademik dan non akademik dapat dikreasi oleh sekolah sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, atau global.
- g. Hubungan kemitraan (*partnership*) antara dunia bisnis dan dunia pendidikan hubungan kemitraan itu dapat dilakukan secara langsung atau melalui komite sekolah.
- h. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi ruang gerak baginya untuk membuat keputusan inovatif dan mengkreasi program demi peningkatan mutu sekolah.
- i. Pemasaran sekolah secara kompetitif. Tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menawarkan produk unggulan atau jasa.

Menurut Suprihatiningrum, (2020: 122) karakteristik sekolah yang melaksanakan manajemen sekolah di antaranya:

- 1) Proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi,
- 2) Kepemimpinan sekolah kuat,
- 3) lingkungan sekolah aman dan tertib,
- 4) Pengelolaan tenaga kependidikan efektif,
- 5) Memiliki budaya mutu,
- 6) Memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis,
- 7) Memiliki kewenangan (kemandirian),
- 8) Partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat,

- 9) Memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen,
- 10) Memiliki kemauan untuk berubah,
- 11) Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan,
- 12) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan,
- 13) Memiliki komunikasi yang baik,
- 14) Memiliki akuntabilitas,
- 15) Memiliki kemampuan menjaga keberlanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas karakteristik manajemen sekolah dapat dipahami, yaitu proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan efektif, mutu pendidikan yang bagus, memiliki tim kerja yang solid, cerdas, dan dinamis, memiliki kewenangan, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, transparansi, semangat untuk berubah, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

### 2.3 Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka

#### 2.3.1 Implementasi Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Sedangkan implementasi manajemen kurikulum merupakan realisasi atau penerapan dari pengelolaan kurikulum yang akan dilaksanakan. Terkait implementasi manajemen kurikulum tetap berada pada ranah fungsi manajemen itu sendiri, yaitu diantaranya:

##### a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan adalah penetapan secara sistematis pengetahuan tentang guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kompri perencanaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membimbing peserta didik kearah perubahan tingkah laku yang lebih baik (Batubara, 2021: 23).

Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa,
- b. Peningkatan akhlak mulia,
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik,
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan,
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional,
- f. Tuntutan dunia kerja,
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
- h. Agama,
- i. Dinamika perkembangan global,
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal ini jelas menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi dan tantangan kehidupan global. Oleh karena itu, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang Pendidikan.

##### b. Pelaksanaan Kurikulum

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan apakah suatu sekolah mampu mewujudkan program sekolah atau tidak. Proses belajar mengajar akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum juga diartikan sebagai proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah, dan adanya pelaksanaan kurikulum maka guru dituntut untuk menjadi mahir dalam merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), memilih desain dan pendekatan serta melakukan pembentukan konsep kompetensi secara aktif dan menerapkan kriteria keberhasilan dalam pendidikan (Syafaruddin & MS, 2017: 72).

Garis besarnya implementasi kurikulum yang perlu diperhatikan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran dan

evaluasi. Dari penjelasan tersebut maka diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum hal yang paling penting diperhatikan adalah potensi dan perkembangan peserta didik karena peserta didik merupakan subjek dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan implementasi kurikulum adalah pengembangan program. Pengembangan program kurikulum oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru meliputi:

- a. Pengembangan program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan,
- b. Program semester. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan hendak dicapai dalam semester tersebut,
- c. Program modul. Program modul adalah program yang dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan dan merupakan penjabaran dari program semester dan berisi lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, lembar jawaban dan kunci jawaban,
- d. Program mingguan dan harian. Program ini merupakan program penjabaran dari program semester dan program modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan perlu diulang bagi setiap peserta didik,
- e. Program pengayaan dan remedial. Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian,
- f. Program bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan kurikulum saat ini, sekolah berkewajiban memberikan program pengembangan diri memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, yang menyangkut pribadi sosial, belajar, dan karir.
- c. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistemik tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan *reliable* untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.

Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik.

Menurut Hermawan evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai secara nyata dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Evaluasi erat kaitannya dengan penilaian, yaitu memberi nilai atau angka kualitatif terhadap hal yang dievaluasi sehingga tergambar tingkat perbandingan antara hasil yang dicapai dengan patokan yang telah ditetapkan. Evaluasi sangat penting dimana kemungkinan ada baiknya dan ada keburukan atau hambatan dalam pelaksanaan sesuai program yang telah dibuat dan disepakati bersama, baik kepala sekolah, pengawas, dan guru.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Artinya bahwa mendayagunakan sumberdaya kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

### 2.3.2 Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Anwar Makarim pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021. Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbud, 2021). Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

### 2.3.3 Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada bagian ini diuraikan mengenai rekomendasi untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan di Indonesia dalam rangka pemulihan pembelajaran. Para pemangku kepentingan terkait perlu memahami dan menyadari bahwa perubahan kurikulum merupakan suatu proses besar yang kompleks,

dan memiliki beberapa tantangan dari berbagai aspek seperti kompetensi guru, situasi dan konteks lokal, serta pengaruh dari kebijakankebijakan lainnya yang terkait pendidikan.

Proses pemaknaan kebijakan dan kemampuan adaptasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait menjadi aspek kunci untuk menyiapkan implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif, yaitu implementasi yang memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk itu, Kemendikbudristek memberikan pilihan bagi satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing satuan pendidikan itu sendiri.

Adapun tiga pilihan kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka pemulihan pembelajaran meliputi Kurikulum 2013 (secara penuh), Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Merdeka. Bersamaan dengan diluncurkannya kebijakan pemulihan pembelajaran ini, Kemendikbudristek juga menyediakan sistem informasi tentang kurikulum-kurikulum di atas dan sebuah platform bernama Platform Merdeka Mengajar sebagai dukungan untuk membantu satuan pendidikan memahami kebijakan ini.

Pada bab tiga menjelaskan rancangan Kurikulum Merdeka dan disampaikan bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan kompetensi yang dituju (Capaian Pembelajaran) dan struktur dasar kurikulum yang relatif longgar. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum. Desain kurikulum yang memberikan fleksibilitas tersebut juga perlu diikuti dengan implementasi yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan.

Oleh karena itu Bab lima menjelaskan kerangka berpikir yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka untuk memulihkan pembelajaran dengan struktur sebagai berikut. Bagian A menjelaskan kerangka teori implementasi yang diadaptasi dari teori sistem ekologi yang dicetuskan oleh Bronfenbrenner dan disesuaikan oleh OECD (2020: 74) untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kurikulum.

Model sistem ekologi tersebut membantu dalam menganalisis tantangan implementasi kurikulum dari berbagai level sistem serta dalam mengidentifikasi peran masing-masing aktor dari level yang berbeda, yang dapat mendukung proses implementasi kurikulum. Dalam Bagian A juga disampaikan teori proses pemaknaan (*sensemaking*) kebijakan pendidikan (Spillane, 2019: 38) yang dipengaruhi faktor internal individu, faktor situasi dan konteks lokal, serta faktor dukungan yang didapat oleh pendidik dan satuan Pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum.

Selanjutnya bagian B menjelaskan konteks pandemi COVID-19 yang menambah kompleksitas implementasi kurikulum. Konteks ini penting sekali untuk disadari, mengingat implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan pada masa yang tidak “normal”. Setelah itu Bagian C menjelaskan strategi kunci untuk implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan kerangka teori dan konteks saat ini, dan dengan merujuk pula pada prinsipprinsip perancangan kurikulum yang telah disampaikan pada Bab tiga Kajian Akademik.

Ada tiga prinsip yang melandasi strategi implementasi kurikulum, yaitu: (1) Kurikulum Merdeka merupakan pilihan, sehingga tidak ada kewajiban untuk satuan pendidikan mengimplementasikannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran, (2) Implementasi kurikulum adalah proses belajar untuk satuan pendidikan dan pendidik, sehingga perlu sesuai dengan tahap kesiapan masing-masing tanpa harus mengimplementasikannya secara seragam, dan (3) dukungan implementasi diberikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pendidik.

Dalam masa pemulihan pembelajaran akan dilaksanakan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi kebijakan terkait beserta komponenkomponennya. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi (*monev*) kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang. Namun demikian, monev juga dilakukan untuk membantu satuan pendidikan bergerak dari tahap implementasi satu ke tahap berikutnya, sehingga implementasi benar-benar menjadi bagian dari perbaikan terus menerus (*continuous improvement*).

#### 2.3.4 Kerangka Teori Implementasi Kurikulum

Implementasi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, adalah suatu proses yang kompleks. Perancang kebijakan perlu memperhatikan kompleksitas karena keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum tersebut tetapi juga oleh pengelolaan perubahan (*change management*) serta strategi yang digunakan untuk mendukung satuan pendidikan dan pendidik mengimplementasikannya.

Menurut Stephen Ball, dkk., (2019: 90), perubahan-perubahan kebijakan termasuk kurikulum seringkali tidak menghasilkan perubahan nyata di ruang-ruang kelas di satuan pendidikan karena pembuat kebijakan tidak memperhatikan kompleksitas implementasinya di tingkat lokal, yaitu di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan di kelas. Spillane (2019: 69) menggunakan analogi permainan “pesan berantai” untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke guru. Pemain di ujung kiri membisikkan pesan kepada orang di sebelahnya, dan kemudian orang ke-2 tersebut melanjutkan ke orang ke-3, dan seterusnya hingga mencapai orang terakhir. Pemenang dari permainan beregu ini adalah kelompok yang dapat menghantarkan pesan dengan deviasi atau penyimpangan isi yang paling sedikit.

Akan tetapi, dalam implementasi kebijakan di satuan pendidikan, permainan pesan berantai ini lebih rumit. Satuan pendidikan dan pendidik sebagai orang ke-3 dari permainan tadi juga menerima pesan dari pihak lain, tidak hanya dari orang pertama (pemerintah pusat). Pesan-pesan itu datang dari pemerintah daerah, orang tua murid, masyarakat, bahkan juga peserta didik. Mereka menyampaikan harapan, keluhan, dan pandangan yang mengharapakan satuan pendidikan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka. Inilah salah satu analogi yang digunakan untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kurikulum. Menurut pengamatan Stephen Ball, dkk (2019: 91), seringkali masalah implementasi diselesaikan melalui pembuatan kebijakan baru tanpa mengubah strategi implementasinya secara signifikan.

Hal ini dilakukan karena pembuat kebijakan berasumsi bahwa rancangan kebijakan sedemikian kuat pengaruhnya untuk mengelola perilaku guru yang menerapkan kebijakan tersebut, tanpa peduli bagaimana kebijakan tersebut diperkenalkan dan dikelola implementasinya. Kegagalan kebijakan membuat perubahan disatuan pendidikan dianggap sebagai kegagalan desain, bukan kegagalan implementasi.

Sementara menurut Taylor (2019: 19), respon tersebut juga dilakukan karena pemerintah merasa bahwa membuat kebijakan adalah hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan di bawah kendali mereka, sementara hal-hal yang terjadi di akar rumput berada di luar kendali mereka. Hal ini lah yang mendorong apa yang disebut "*the more things change, the more they remain the same*" (semakin banyak perubahan, semakin banyak yang sama saja) (Wilcox, 2019: 40). Karena perubahan terus dilakukan namun strategi implementasi yang justru menjadi problemnya tidak pernah diselesaikan.

Dalam kajiannya tentang bagaimana sekolah-sekolah di Amerika Serikat merespon reformasi kebijakan, Bryk, dkk., (2019: 93) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda akan selalu menimbulkan reaksi dan respon yang berbeda. Hal ini terjadi sebagai dampak dari interaksi antara kebijakan yang datang dari luar sekolah dengan kebijakan, praktik, tradisi, dan budaya yang sudah berjalan di sekolah. Proses adaptasi kebijakan seringkali akan menimbulkan konflik dan masalah baru di satuan pendidikan, dan hal ini pada hakikatnya adalah bagian dari proses belajar (Bryk et al., 2019: 48). Namun demikian, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan satuan pendidikan sendiri melewati proses belajar yang penuh dinamika tersebut.

Sebaliknya, dukungan harus terus diberikan agar proses yang terjadi di satuan pendidikan tersebut menghasilkan luaran yang diharapkan, yaitu implementasi kebijakan yang secara nyata berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Dinamika dan problem baru yang muncul akibat diperkenalkan dan diimplementasikannya kebijakan baru pun berbeda-beda sesuai konteks satuan pendidikan masing-masing. Pada saat yang sama, dukungan untuk melancarkan proses implementasi juga dibutuhkan dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Untuk memahami konteks serta dukungan dari pemangku kepentingan yang dimaksud, pendekatan sistem ekologi digunakan untuk memvisualisasikannya.

#### 2.3.5 Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Proses pemaknaan (*sensemaking*) dan pembuatan keputusan atau kebijakan yang benar-benar diterapkan, menurut Ball (2019: 97), akan selalu dilakukan terlepas dari arahan pemerintah pusat. Dengan kata lain, didukung ataupun tidak didukung oleh pemerintah, proses penyesuaian atau adaptasi kebijakan di level satuan pendidikan bahkan di kelas akan tetap ada. Oleh karena itu, agar proses ini tidak melenceng dari tujuan perubahan kurikulum, pemerintah perlu merancang strategi implementasi kurikulum dengan memperhatikan kompleksitas di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan juga di konteks pembelajaran yang terganggu dengan adanya pandemi COVID-19.

Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum nasional. Seperti juga di banyak negara lainnya, perubahan kurikulum adalah salah satu strategi utama untuk merespon isu-isu krisis pembelajaran, terlepas dari isu spesifik yang dihadapi di masing-masing negara (Bjork, 2020: 48). Perancangan strategi implementasi Kurikulum Merdeka perlu didasari pada pelajaran dari implementasi kurikulum yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.

Selain itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum, yaitu: (1) sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, (2) fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; (3) fleksibel, (4) selaras, (5) bergotong royong, dan (6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Berdasarkan prinsip-prinsip perancangan kurikulum, kerangka teori implementasi kurikulum, pembelajaran dikonteks pandemi COVID-19, serta berbagai pelajaran dari implementasi kurikulum yang telah dilakukan diberbagai konteks, ada tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.

Pertama, Kurikulum Merdeka adalah pilihan, sehingga satuan pendidikan dapat mengambil keputusan apakah mereka akan menerapkannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran atau tidak. Kedua, implementasi kurikulum adalah proses belajar, sehingga seperti halnya peserta didik belajar sesuai dengan tahap capaian kompetensi mereka, satuan pendidikan dan pendidik juga mengimplementasikan kurikulum sesuai tahap kesiapan mereka. Dengan demikian, bentuk implementasi kurikulum tidak harus seragam untuk semua satuan pendidikan. Ketiga, bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif,

sebagaimana sistem ekologi yang diadaptasi dari teori Bronfenbrenner (OECD, 2020: 77) sehingga intervensi dilakukan untuk mempengaruhi faktor yang langsung dan yang tidak langsung berkaitan dengan implementasi kurikulum.

Perlu disampaikan bahwa kebijakan tentang pemulihan pembelajaran ini diatur untuk jangka pendek sekitar dua atau tiga tahun mulai pada Tahun Ajaran 2022/2023, saat masa pemulihan pembelajaran berlaku. Ini artinya strategi implementasi serta status Kurikulum Merdeka sebagai salah satu pilihan juga berlaku untuk jangka waktu tersebut. Setelah dua atau tiga tahun diimplementasi, Kemendikbudristek rencananya akan menetapkan status Kurikulum Merdeka karena harapannya pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19 juga sudah berakhir, dan perubahan ini pun dapat mempengaruhi strategi implementasi yang akan diterapkan kemudian. Berikut ini adalah penjelasan tentang tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian dalam menghasilkan sumber data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini mempunyai permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna, serta perlu pemahaman situasi sosial yang mendalam, (Hadi, 2004: 73). Menurut Sukmadinata (2009: 34), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2019: 23).

Penelitian deskriptif merupakan teknik penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi atau kejadian yang telah ada dan ditemui di lapangan berupa masyarakat, permasalahan, atau gejala didalam masyarakat, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang mendalam, kemudian data disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka (Meleong, 2020: 107). Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:

- a. UPTD SD Negeri 21 Bireuen, yang berlokasi di jalan Laksamana Malahayati, Kampung Baru Kota Juang, Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
- b. UPTD SD Negeri 18 Bireuen, yang berlokasi di Jalan Pendidikan, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena di 2 (dua) satuan Pendidikan tersebut saat ini sedang mengimplementasikan kurikulum merdeka, selain itu lokasi tersebut merupakan tempat yang mudah dijangkau bagi peneliti untuk mengadakan penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di 2 (tiga) satuan Pendidikan tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Bireuen.

Waktu penelitian dijadwalkan dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian dapat melebihi batasan waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penentuan jadwal penelitian terkait erat dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Pengumpulan data tidak dilakukan lagi apa bila dipandang telah mencukupi dan tidak ada informasi baru, (Afifuddin, 2019: 58).

#### **Subjek Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan studi lapangan, maka pengumpulan datanya merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang berupa data verbal dalam bentuk kata bukan angka. Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan kajian pustaka, sehingga pembahasannya dapat dilakukan dengan mengedit, mereduksi, menyajikan, dan selanjutnya menganalisis, (Muhajir, 2020: 36). Penekanan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bireuen.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian telah tercermin dalam fokus penelitian. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan informan dengan Teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan tidak didasarkan strata, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Mereka yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa mereka telah mewakili dan disesuaikan dengan bidang-bidangnya di sekolah tempat peneliti melakukan penelitian. Maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan yang terdiri dari:

- a. Informan kunci, berjumlah 2 orang kepala sekolah, yaitu:
  1. Hamdani, M. S. Pd, Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  2. Bahagia, S. Pd, Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen,
- b. Informan utama, berjumlah 6 orang orang guru, yaitu:
  1. Nilawati, S. Pd, guru kelas I pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  2. Dewi Anjani, S. Pd, guru kelas II pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  3. Sariana, S. Pd, guru kelas III pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  4. Tri Wahyuni, S. Pd, guru kelas IV pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
  5. Ernawati, S. Pd, guru kelas V pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
  6. Ernita, S. Pd, guru kelas VI pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
- c. Informan tambahan, berjumlah 4 orang siswa, yaitu:
  1. Aqil Akmal, peserta didik kelas IV pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  2. M. Ikhsan, peserta didik kelas V pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
  3. Lukman, peserta didik kelas VI pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen.

#### **Instrumen Penelitian**

Moleong (2020: 83) mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencerita (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat apa yang akan diteliti. Sejalan dengan itu, Nasution (2019: 29) mengatakan, "Manusia sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi." Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, *tape recorder*, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data (Bogdan dan Biklen, 2020: 162).

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireueun. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dibedakan antara pedoman wawancara yang digunakan khusus untuk kepala sekolah, guru dan pedoman wawancara untuk siswa. Pedoman wawancara khusus untuk kepala sekolah dan guru berisi pertanyaan-pertanyaan tentang proses pelaksanaan implementasi manajemen kurikulum merdeka.

Pedoman wawancara untuk siswa tentang implementasi di kelas. *Tape recorder* digunakan untuk merekam pembicaraan saat mengadakan wawancara. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dianggap mendukung serta mendapatkan kejelasan tentang data tertentu dalam penelitian, sementara catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Sugiono (2019: 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti memilih observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data adalah untuk proses validasi terhadap teknik pengumpulan data lainnya yaitu proses wawancara. Observasi langsung dari peneliti terhadap tempat penelitian dapat menguatkan terhadap hasil wawancara dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai antara hasil wawancara dan pengamatan (observasi), sekaligus untuk mengatasi kelemahan teknik wawancara.

- a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2019: 194).

Sugiyono (2019: 195) menambahkan teknik wawancara terdiri atas wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.

Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan maksudkan untuk memperoleh data secara mendalam. Tanya jawab dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan sebelumnya, mengenai implementasi manajemen kurikulum merdeka di sekolah SD Negeri Kabupaten Bireuen.

b. Observasi.

Mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang diteliti, seluruh data hasil pengamatan selanjutnya dikumpulkan dan diklarifikasikan menurut jenisnya yaitu tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireueun. Peneliti melakukan dua tahap observasi yang sifatnya umum adalah pengamatan dilakukan terhadap berbagai unsur di satuan Pendidikan Kabupaten Bireuen, yang dapat membantu penelitian ini.

Sedangkan yang bersifat khusus adalah pengamat melihat langsung dan mencatat situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan atau informasi yang langsung diperoleh dari data yang dibutuhkan, yang dilakukan terhadap implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireueun yaitu (1). Struktur organisasi, (2). Pelaksanaan program, (3). Keberadaan Sekolah, (4). Data/dokumentasi struktur sekolah, (5). Usaha-usaha pengembangan yang berwujud finansial yang dilakukan, (6). Hasil akhir kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi

Arikunto, (2020: 94) dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya (Nasution, 2019: 49).

#### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan karya ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. *Credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
2. *Transfer ability*. Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.
3. *Dependability*. *Dependability* adalah penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.
4. *Confirmability*. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*, (Moleong, 2019: 97).

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data akan peneliti lakukan sebagai upaya untuk mencatat hasil observasi secara sistematis, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang peneliti teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dengan melakukan pengelompokkan data, merangkumkan data-data mana yang penting dan tidak penting, karena tidak dapat dipungkiri apabila peneliti semakin lama di lapangan maka jumlah data-data yang adapun semakin banyak, luas dan semakin rumit.

b. Penyajian data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti selanjutnya akan melakukan penyajian data yaitu dari data/hasil yang didapat dilapangan dan telah dikelompokkan atau dirangkumkan dengan lebih spesifik dan jelas, peneliti akan melakukan penyajian data yang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil dari yang telah didapat, seperti hasil dari observasi, maka peneliti akan mengurutkan observasi yang mana terlebih dahulu untuk disusun agar hasil observasi yang dilakukan lebih memiliki hubungan yang saling keterkaitan

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

##### **Perencanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun.**

Untuk mengetahui perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, diukur dengan 6 (enam) indikator pertanyaan, yaitu: (a) ketersediaan sumber daya (b) koordinasi antar instansi, (c) penguatan kapasitas, (d) pengukuran kinerja, (e) keterlibatan pemangku kepentingan, dan (f) mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun.

##### **a. Ketersediaan Sumber Daya**

Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka, di SD ini sudah tersedia SDMnya untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka, misalnya: (1) ketersediaan tenaga pendidik dan staf, saat ini memiliki jumlah guru yang memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka, mereka semua dibekali dengan pelatihan agar memahami dan dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan efektif, (2) ketersediaan bahan ajar dan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, ini mencakup buku teks, materi tambahan, alat peraga, dan sumber daya digital, (3) ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, saat ini sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, termasuk kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan peralatan lain yang diperlukan. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Saya rasa sudah lengkap terkait dengan ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, misalnya: (1) ketersediaan teknologi dan perangkat ajar, dalam era digital saat ini, teknologi menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, sekolah memiliki akses ke perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, seperti komputer, proyektor, dan perangkat pembelajaran *online*, (2) ketersediaan dana dan anggaran, kepala sekolah sudah berupaya untuk tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka, kepala sekolah memastikan ada anggaran yang cukup untuk melatih guru, membeli bahan ajar, dan memelihara fasilitas, (3) partisipasi orang tua dan Masyarakat, ini sangat penting melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, karena dapat membantu mengumpulkan dukungan dan sumber daya tambahan, mereka dapat berkontribusi dalam berbagai cara, mulai dari mendukung pembelajaran di rumah hingga menyumbangkan sumber daya fisik atau keahlian khusus. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Untuk sekolah kami di sini Syukur Alhamdulillah sudah sangat mendukung ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka, diantaranya: (1) tersedianya Tenaga pendidik dan tendik, (2) tersedianya bahan ajar dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, (3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (4) adanya kerja sama dengan pihak terkait, dan (5) adanya komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan terhadap ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sudah tersedia sumber daya untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka, hal tersebut terlihat dengan tersedianya guru, staf, bahan ajar, materi ajar, sarana prasarana yang lengkap, adanya teknologi informasi

perangkat ajar, tersedianya anggaran yang cukup, adanya dukungan orangtua siswa, adanya komunitas belajar, dan terlibatnya *stakeholder*. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa, sudah tersedia dengan lengkap sumber dayanya, diantaranya: (a) tersedianya tenaga pendidik dan staf, (b) bahan ajar dan materi pembelajaran, (c) infrastruktur dan fasilitas, (d) teknologi dan perangkat, (e) dana dan anggaran, (f) partisipasi orang tua dan masyarakat, (g) evaluasi dan monitoring, (h) pengembangan kurikulum lokal, (i) kerja sama dengan pihak terkait, (j) komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*.

#### b. Koordinasi Antar Instansi

Untuk mengetahui tentang koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Koordinasi antar instansi sangat penting dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Kurikulum merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. SD Negeri 1 menganggap penting dalam koordinasi antar instansi, selama ini hal yang dilakukan diantaranya, (1) melakukan koordinasi antar Pemerintah, perlu bekerja sama secara terkoordinasi untuk menyusun pedoman, kebijakan, dan panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, (2) melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah di tingkat kabupaten, hal ini perlu berkomunikasi secara teratur dengan sekolah-sekolah lain untuk syering terkait penerapan kurikulum merdeka yang benar, (3) adanya partisipasi guru, guru merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, koordinasi dengan guru melibatkan pelatihan yang berkualitas, pengembangan kurikulum, dan forum kolaboratif untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Tri Wahyuni, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sejauh ini sekolah sudah melakukan koordinasi dengan sangat baik, misalnya (1) melakukan koordinasi dengan orang tua siswa dan masyarakat, dalam hal ini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan adalah penting, sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin, seminar, atau program pendidikan orang tua untuk menjelaskan tentang kurikulum merdeka dan mengajak mereka terlibat dalam mendukung pembelajaran di rumah, (2) sekolah melakukan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan swasta, LSM pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, berkolaborasi dengan pihak-pihak ini dapat memperluas sumber daya dan pengalaman yang tersedia, (3) sekolah melakukan koordinasi teknologi dan infrastruktur, Pemerintah, sekolah, dan mitra lainnya perlu berkoordinasi untuk memastikan tersedianya infrastruktur teknologi yang diperlukan, seperti akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak, untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Menurut yang saya ketahui sekolah sudah melakukan koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka, misalnya (1) koordinasi dengan pemerintah terkait implementasi kurikulum merdeka, (2) koordinasi dengan dinas pendidikan, (3) koordinasi antar sekolah, (4) melakukan monitoring dan evaluasi bersama, (5) melakukan pemecahan masalah bersama, koordinasi antar instansi memungkinkan pemecahan masalah bersama untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul, (6) pemberian dukungan finansial, koordinasi juga dapat mencakup alokasi dan pengelolaan anggaran yang efisien untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. (Wawancara: 10 September 2023).

Observasi peneliti di lapangan tentang koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah melakukan koordinasi antar pemerintah, melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah, melakukan koordinasi dengan orang tua dan masyarakat, melakukan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah, melakukan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur, dan melibatkan partisipasi guru terhadap perencanaan implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 11 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (1) melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah, (2)

melakukan koordinasi dengan orang tua dan masyarakat, (3) melakukan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah, (4) melakukan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur, (5) melibatkan partisipasi guru, (6) melakukan monitoring dan evaluasi bersama, (7) melakukan pemecahan masalah bersama, dan (8) memberikan pemberian dukungan finansial.

c. Penguatan Kapasitas

Untuk mengetahui penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Penguatan kapasitas yang dilakukan sekolah yaitu: (1) pelatihan dan pengembangan guru, melakukan pelatihan intensif bagi guru tentang kurikulum merdeka, termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum merdeka, dan memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti pelatihan tambahan yang relevan, baik secara daring maupun tatap muka, yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, (2) sumber daya kurikulum, memastikan bahwa sumber daya kurikulum yang diperlukan, seperti buku teks, materi pembelajaran, dan alat bantu pengajaran, tersedia dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, mengembangkan atau memperbarui bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa: Banyak hal yang sudah dilakukan untuk penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka, diantaranya (1) melakukan kolaborasi dan konsultasi, pihak sekolah mendorong kolaborasi antara guru-guru dalam tim kurikulum dan tim manajemen sekolah untuk berbagi pengalaman dan strategi pengajaran yang berhasil, melibatkan orang tua dan wali murid serta komunitas dalam proses perencanaan dan implementasi kurikulum merdeka, (2) penguatan pemantauan dan evaluasi, membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang akan memonitor pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah, mengidentifikasi masalah, dan menyusun solusi. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan kurikulum dan mengadaptasi rencana jika diperlukan. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Penguatan yang kami lakukan di sekolah ini yaitu (1) dukungan administratif, memastikan bahwa adanya dukungan administratif yang memadai, termasuk alokasi anggaran, perencanaan jadwal, dan manajemen waktu yang efisien, (2) pengembangan kepemimpinan, mendorong pengembangan kepemimpinan yang kuat di tingkat sekolah, termasuk kepala sekolah dan koordinator kurikulum, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kurikulum merdeka dan mampu memotivasi staf sekolah. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah melakukan penguatan terhadap (1) peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga mereka selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka, (2) pelibatan *stakeholder*, mengadakan pertemuan rutin dengan *stakeholder* utama, seperti Komite Sekolah, untuk berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa penguatan yang dilakukan yaitu (a) penguatan pelatihan dan pengembangan guru, (b) penguatan sumber daya kurikulum, (c) penguatan kolaborasi dan konsultasi, (d) penguatan pemantauan dan evaluasi, (e) penguatan dukungan administratif, (f) penguatan pengembangan kepemimpinan, (g) penguatan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, dan (h) penguatan pelibatan *stakeholder*. Penguatan kapasitas dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.

d. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Pengukuran kinerja dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah SD ini sangat penting untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan

memastikan bahwa tujuan kurikulum tercapai, selama ini ada beberapa langkah untuk mengukur kinerja dilakukan, misalnya: (1) melakukan identifikasi indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran kurikulum merdeka, ini dapat mencakup tingkat pencapaian siswa, peningkatan hasil tes, tingkat partisipasi, dan sebagainya, (2) penetapan target, menetapkan target yang jelas untuk setiap indikator kinerja, target yang realistis dan dapat diukur, sehingga memungkinkan evaluasi yang akurat, (3) pemantauan berkala, melakukan pemantauan secara berkala dilakukan melalui evaluasi harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara dengan Ernawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Pengukuran kinerja yang dilakukan di SD ini yaitu: (1) melakukan pengumpulan data, mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja, seperti hasil tes siswa, laporan kehadiran, atau survei kepuasan orang tua, (2) melakukan analisis data, analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pencapaian, dan ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan, (3) evaluasi proses pengajaran, evaluasi proses pengajaran yang dilakukan guru dengan melibatkan observasi kelas, penilaian portofolio siswa, dan wawancara dengan guru. (Wawancara dengan Ernawati, (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Pengukuran kinerja yang dilakukan di sekolah SD kami diantaranya yaitu: (1) melakukan konsultasi *stakeholder*, melibatkan *stakeholder* seperti orang tua, siswa, dan guru dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan dan pandangan guru-guru tentang implementasi kurikulum merdeka, (2) melakukan perbaikan dan penyesuaian, setelah menganalisis data kinerja, kemudian melakukan identifikasi area yang perlu perbaikan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka, (3) membuat laporan dan melakukan komunikasi, secara berkala tentang kinerja kurikulum merdeka dan membagikan kepada semua pihak terkait, termasuk komite sekolah, orang tua, dan guru. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa sekolah: (1) membuat pelatihan dan pengembangan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pihak sekolah menentukan apakah diperlukan pelatihan atau pengembangan tambahan bagi guru atau staf sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum, (2) melibatkan komunitas, hal ini jika memungkinkan, maka melibatkan komunitas lokal dalam pemantauan dan evaluasi kinerja untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari mereka, (3) melakukan evaluasi berkelanjutan, pada proses pengukuran kinerja diharuskan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan terus dilakukan dan kurikulum berkembang sesuai dengan kebutuhan. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat dipahami bahwa, sekolah berupaya melakukan: (a) mengidentifikasi indikator kinerja utama, (b) penetapan target, (c) pemantauan berkala, (d) pengumpulan data, (e) analisis data, (f) evaluasi proses pengajaran, (g) konsultasi *stakeholder*, (h) perbaikan dan penyesuaian, (i) laporan dan komunikasi, (j) pelatihan dan pengembangan, (k) pelibatan komunitas, dan (l) evaluasi berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang efektif dalam implementasi Kurikulum Merdeka akan membantu sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini.

#### e. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Khusus untuk SDN 1 ini semua komponen pemangku kepentingan sangat terlibat, diantaranya: (a) keterlibatan guru dan staf sekolah, adalah pemangku kepentingan utama dalam implementasi kurikulum, mereka harus aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, ini dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, dan forum diskusi, (b) keterlibatan orang tua dan wali murid, memiliki peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka, sekolah harus mengadakan pertemuan orang tua-guru, mengirimkan laporan perkembangan siswa secara berkala, dan mendengarkan masukan serta kekhawatiran orang tua terkait kurikulum, (c) dukungan dari komite sekolah, adalah lembaga pengambil keputusan di tingkat sekolah, anggota komite sekolah memiliki pemahaman yang cukup tentang kurikulum merdeka dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Syukur Alhamdulillah semua terlibat, diantaranya: (a) guru dan staf yang memiliki peran penting di sekolah, (b) komite sekolah yang memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan sekolah, (c) berkolaborasi dengan komunitas belajar, dapat menjadi sumber daya yang berharga dengan bekerja sama untuk mendukung inisiatif pendidikan, seperti mengadakan acara kegiatan ekstrakurikuler atau mendapatkan dukungan dalam hal sumber daya dan fasilitas, (d) melakukan konsultasi dengan ahli pendidikan seperti pengembang kurikulum atau peneliti pendidikan ini dapat membantu dalam merancang dan mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka, (e) membuat forum diskusi terbuka yang melibatkan semua pemangku kepentingan, berupa pertemuan rutin, seminar, atau lokakarya yang memungkinkan semua pihak untuk berbicara tentang isu-isu terkait kurikulum. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan kunci kesuksesan implementasi kurikulum merdeka, selama ini semua komponen terlibat, diantaranya, kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat, serta pemerintah. Selain itu sekolah melakukan survei kepuasan dan umpan balik terhadap orang tua, siswa, dan guru secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, menggunakan hasil survei ini untuk perbaikan dan penyesuaian. Kemudian adanya transparansi dan komunikasi terbuka, memastikan bahwa informasi tentang kurikulum merdeka, rencana pelaksanaan, dan perkembangan terbaru disampaikan secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan, hal ini dapat dilakukan melalui situs web sekolah, buletin, atau media social. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi di lapangan tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa semua pemangku kepentingan terlibat, seperti: kepala sekolah, guru, staf, orangtua siswa, komite sekolah, dan Masyarakat, kemudian pihak sekolah mempertimbangkan masukan dalam pengambilan keputusan, dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan atau peningkatan pada kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa, semua elemen pemangku kepentingan terlibat, diantaranya: (a) keterlibatan guru dan staf sekolah (b) keterlibatan orang tua dan wali murid, (c) dukungan dari komite sekolah, (d) berkolaborasi dengan komunitas belajar, (e) melakukan konsultasi dengan ahli Pendidikan, (f) membuat forum diskusi terbuka, (g) melakukan survei kepuasan dan umpan balik terhadap orang tua, (h) siswa, dan guru secara berkala, (i) transparansi dan komunikasi terbuka. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah elemen kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa.

#### f. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara dengan Miftahul Jannah, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Mekanismenya yaitu: (a) penetapan indikator kinerja, menentukan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan implementasi kurikulum, hal ini termasuk tingkat pencapaian siswa, hasil tes, tingkat partisipasi, dan lainnya, (b) pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur indikator kinerja, ini mencakup data hasil tes siswa, laporan kehadiran, data partisipasi, dan hasil survei, dan (c) pemantauan berkala, melakukan pemantauan secara berkala selama pelaksanaan kurikulum, ini dapat melibatkan observasi kelas, penilaian portofolio siswa, dan wawancara dengan guru. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Ada 3 (tiga) mekanisme yang dilakukan, yaitu: (a) evaluasi hasil yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja, melakukan identifikasi tren, pencapaian, dan ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan, (b) evaluasi proses pengajaran, penting untuk mengevaluasi proses pengajaran, ini dilakukan melalui observasi kelas, penilaian pengajaran guru, dan diskusi dengan guru tentang pendekatan yang digunakan dalam pengajaran, (c) survei dan umpan balik terkait kepuasan siswa, orang tua, dan guru untuk mengumpulkan umpan balik tentang kurikulum dan implementasinya, ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Mekanisme yang dilakukan ada beberapa tahapan yaitu: (a) pertemuan dan diskusi berkala, mengadakan pertemuan rutin dengan tim manajemen sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas perkembangan implementasi kurikulum, masalah yang muncul, dan rencana perbaikan, (b) perbandingan dengan standar, melakukan perbandingan hasil dan proses dengan standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum Merdeka, ini membantu dalam menentukan apakah sekolah telah mencapai tujuan yang ditetapkan, (c) tindak lanjut dan perbaikan, setelah evaluasi, melakukan identifikasi area yang perlu perbaikan dan menindak lanjuti dengan rencana tindakan yang jelas, memastikan bahwa rencana tindakan tersebut dapat dijalankan dengan efektif. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa: (a) pelaporan hasil, membuat laporan berkala tentang hasil monitoring dan evaluasi, laporan ini disampaikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, orang tua, dan guru, (b) evaluasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari proses berkelanjutan, proses ini harus berjalan sepanjang tahun ajaran untuk memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan, (c) pelatihan dan pengembangan, berdasarkan hasil evaluasi, maka menentukan apakah diperlukan pelatihan atau pengembangan tambahan bagi guru atau staf sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (a) penetapan indikator kinerja, (b) pengumpulan data yang diperlukan, (c) pemantauan berkala, (d) evaluasi hasil yang telah dikumpulkan, (e) evaluasi hasil yang telah dikumpulkan, (f) evaluasi proses pengajaran, (g) survei dan umpan balik terkait kepuasan siswa, (h) pertemuan dan diskusi berkala, (i) perbandingan dengan standar, (j) tindak lanjut dan perbaikan.

#### **Pelaksanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen**

Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, diukur dengan 7 (tujuh) indikator pertanyaan, yaitu sebagai berikut: (a) kecepatan pelaksanaan, (b) konsistensi implementasi, (c) dukungan kepemimpinan, (d) partisipasi masyarakat, (e) kapasitas pelaksana, (f) koordinasi antar instansi, (g) monitoring dan evaluasi.

##### **a. Kecepatan Pelaksanaan**

Untuk mengetahui kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Menurut saya terkait dengan kecepatan terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka tergantung pada dua faktor: (a) kesiapan sekolah, tingkat kesiapan sekolah dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan SDM akan memengaruhi sejauh mana kurikulum ini dapat segera diimplementasikan, kami bersyukur di sekolah ini sangat siap dalam aspek ini, (b) pelatihan dan pengembangan guru, pelatihan yang efektif bagi guru-guru tentang kurikulum merdeka akan mempersiapkan guru dengan baik untuk mengimplementasikannya, kecepatan dan ketepatan pelatihan serta penerimaan oleh guru dapat memengaruhi tingkat kesiapan mereka. (Wawancara: 04 September 2023).

Berbeda halnya hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kami siap dalam segala hal untuk kecepatan implementasi kurikulum Merdeka, misalnya: (a) adanya dukungan pemerintah dan sumber daya, tingkat dukungan dari pemerintah daerah atau pusat, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan, seperti buku teks, materi ajar, dan perangkat pembelajaran, sangat berdampak pada kecepatan implementasi, (b) terjadinya perubahan budaya dan *mindset*, perubahan dalam budaya sekolah dan *mindset* guru, siswa, dan orang tua terhadap pendekatan kurikulum merdeka memang memerlukan waktu, namun proses di sekolah ini bisa lebih cepat, karena ada pemahaman dan komunikasi yang efektif tentang manfaatnya. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Berdasarkan pengalaman di sekolah ini kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka tergantung pada dua hal yaitu: (a) evaluasi dan penyesuaian, implementasi kurikulum selalu memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, kecepatan dalam merespons hasil evaluasi dan melakukan perubahan yang diperlukan akan memengaruhi kesuksesan implementasi, (b) faktor lokal, faktor-faktor khusus seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan

geografis di daerah tempat sekolah berada juga dapat memengaruhi kecepatan implementasi. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa (a) adanya kesiapan sekolah, (b) adanya dukungan pemerintah, (c) adanya pelatihan kepada guru-guru, (d) terjalinya komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*, keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses implementasi dapat mempercepat proses implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa, kecepatan pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, yaitu: (a) kesiapan sekolah, (b) pelatihan dan pengembangan guru, (c) dukungan pemerintah dan sumber daya, (d) perubahan budaya dan *mindset*, (e) evaluasi dan penyesuaian, (f) faktor lokal, (g) komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*. Dalam banyak kasus, implementasi kurikulum baru memerlukan waktu untuk adaptasi dan pengembangan. Penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mempercepat pelaksanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen.

#### b. Konsistensi Terhadap Pelaksanaan

Untuk mengetahui tentang konsistensi terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Konsistensi dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 adalah kunci keberhasilan jangka Panjang, dan kami sangat konsisten melaksanakannya, hal ini terukur dengan (a) perencanaan yang matang, kami membuat rencana yang matang dan terperinci untuk implementasi kurikulum, termasuk tujuan jangka panjang, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan, (b) mengadakan pelatihan berkelanjutan, pelatihan yang berkelanjutan untuk guru dan staf sekolah agar mereka selalu mendapatkan pemahaman terbaru tentang kurikulum merdeka dan dapat mengikuti perkembangan terkini dalam Pendidikan, (c) melakukan monitoring dan evaluasi rutin, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses implementasi dan hasilnya, ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan yang terdapat kekurangannya. (Wawancara: 08 September 2023).

Tidak jauh berbeda halnya hasil wawancara dengan Tri Wahyuni, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sekolah SDN 18 sangat konsisten buktinya kami (a) membuat perencanaan yang matang untuk pelaksanaannya, (b) mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru dan staf terkait implementasi kurikulum merdeka, (c) melibatkan *stakeholder*, sekolah melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum merdeka dan memastikan komunikasi terbuka dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaannya, (d) menyediakan sumber daya yang konsisten, termasuk buku teks, perangkat pembelajaran, dan peralatan pendidikan lainnya, (e) memiliki pemimpin yang mendukung sepenuhnya implementasi kurikulum merdeka dan memastikan konsistensi dalam penerapannya di sekolah. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sejauh ini sangat konsisten dilakukan oleh sekolah terhadap implementasi kurikulum merdeka, misalnya: (a) melakukan komunikasi yang efektif, antara semua pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa, untuk memastikan pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka dan tujuan pendidikan, (b) melakukan penyesuaian dan perbaikan, selalu siap untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari guru dan siswa, (c) adanya budaya sekolah yang mendukung, membangun budaya sekolah yang mendukung perubahan dan inovasi dalam pendidikan, sehingga konsistensi dalam implementasi kurikulum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. (Wawancara: 10 September 2023).

Observasi peneliti di lapangan tentang konsistensi terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah-sekolah SD di Kabupaten Bireuen sangat konsisten pelaksanaannya, hal tersebut terukur dengan perencanaan yang matang, mengadakan pelatihan berkelanjutan kepada guru-guru dan staf, serta adanya pemantauan oleh otoritas pendidikan di tingkat pemerintah daerah bahkan pusat berperan aktif dalam memantau dan mendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. (Observasi: 11 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang konsistensi terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa sangat konsisten, hal ini terukur dengan beberapa indikator yaitu: (a) perencanaan yang

matang, (b) mengadakan pelatihan berkelanjutan, (c) melakukan monitoring dan evaluasi rutin, (d) melibatkan *stakeholder*, (e) menyediakan sumber daya yang konsisten, (f) memiliki pemimpin yang mendukung sepenuhnya implementasi kurikulum merdeka, (g) melakukan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, (h) melakukan penyesuaian dan perbaikan, (i) adanya budaya sekolah yang mendukung, dan adanya pemantauan oleh otoritas pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kurikulum sangat membantu mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dan meningkatkan kualitas Pendidikan, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang stabil dan terstruktur bagi siswa.

c. Dukungan kepemimpinan

Untuk mengetahui dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Dukungan kepemimpinan sangat penting dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 ini, kepemimpinan yang kuat dapat memberikan arah, motivasi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil menerapkan kurikulum merdeka. Kepala sekolah memiliki visi yang jelas tentang pentingnya kurikulum merdeka dan komitmen untuk menerapkannya. Kepala sekolah menjadi teladan bagi staf sekolah dan menunjukkan dukungan mereka secara aktif. Kepala sekolah bekerja sama dengan staf sekolah untuk mengembangkan rencana dan strategi implementasi yang konkret dan terperinci. Rencana ini mencakup tujuan jangka panjang, langkah-langkah taktis, dan alokasi sumber daya. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kepala sekolah memastikan bahwa guru-guru mendapatkan pelatihan yang memadai tentang kurikulum Merdeka, hal ini mencakup pelatihan awal dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka. Kepala sekolah aktif dalam pemantauan dan evaluasi proses implementasi dan mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk mendengar masukan mereka, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi. Kepala sekolah memberikan dukungan emosional kepada staf sekolah, terutama dalam menghadapi perubahan, kepala sekolah mendorong dan memotivasi guru-guru untuk beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kepala sekolah sangat berperan dalam melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, hal ini mencakup menyelenggarakan pertemuan orang tua, diskusi masyarakat, atau kampanye komunikasi. Kepala sekolah selalu siap untuk mengatasi masalah yang muncul selama implementasi kurikulum merdeka dan mencari solusi secara proaktif. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa kepemimpinan sekolah berbasis data dan fakta dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kurikulum merdeka, ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang. Kepemimpinan kepala sekolah menjaga komunikasi terbuka dan transparan dengan staf sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, ini sangat membantu menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (a) kepala sekolah memiliki visi dan komitmen yang jelas, (b) kepala sekolah memiliki program pengembangan rencana dan strategi, (c) kepala sekolah memiliki program pelatihan dan pengembangan guru, (d) kepala sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi, (e) kepala sekolah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, (f) kepala sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat, (g) kepala mampu melakukan penyelesaian masalah, (h) kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sangat informatif dan terbuka. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan terlibat, implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen, maka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membimbing dan memotivasi seluruh komunitas sekolah menuju perubahan positif dalam pendidikan.

d. Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Miftahul Jannah, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Masyarakat sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 ini, dan partisipasinya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sukses dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat hubungan antara sekolah, siswa, dan komunitas sekitar. Selama ini masyarakat memberikan dukungan moral dan emosional kepada sekolah dengan menghadiri acara-acara sekolah, seperti pertemuan orang tua guru, pertunjukan siswa, atau kegiatan sosial. Masyarakat berperan sebagai mitra pendidikan dengan aktif terlibat dalam proses pembelajaran, masyarakat dilibatkan menjadi pembicara tamu, mentor, atau sukarelawan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Masyarakat disini sangat berpartisipasi aktif, mereka memberikan kontribusi berupa sumber daya materi, seperti buku, peralatan, atau dana untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Saat sekolah mengadakan forum atau pertemuan melibatkan orang tua dan anggota masyarakat untuk mengumpulkan masukan dan ide terkait implementasi kurikulum merdeka. Masyarakat dalam hal ini turut andil membantu merumuskan kebijakan sekolah dan memberikan perspektif yang beragam. Orang tua siswa dan masyarakat saling membantu dalam proses evaluasi sekolah, seperti mengikuti survei kepuasan orang tua atau memberikan umpan balik konstruktif tentang program Pendidikan. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Syukur Alhamdulillah masyarakat di sini sangat kompak untuk ambil bagian berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka. Masyarakat membantu dengan sarana transportasi desa bagi siswa yang kesulitan mencapai sekolah, terutama di daerah yang sulit diakses siswa, dan masyarakat terlibat aktif membantu mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya kurikulum merdeka dan dampak positifnya terhadap pendidikan anak-anak. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa masyarakat berpartisipasi membantu menjaga keamanan sekolah dan lingkungan sekitarnya dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau memberikan dukungan dalam hal keselamatan siswa. Orang tua dan Masyarakat memantau perkembangan akademik dan sosial siswa, serta berkomunikasi dengan sekolah tentang masalah yang mungkin timbul. Selain itu Masyarakat memberikan inspirasi kepada siswa dengan berbagi pengalaman hidup dan karier mereka, berperan sebagai model bagi siswa. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa Masyarakat sangat berperan aktif, diantaranya: (a) mendukung sekolah, (b) menjadi mitra pendidikan, (c) memberikan sumber daya, (d) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (e) membantu mengevaluasi proses, (f) membantu dengan sarana transportasi, (g) kampanye kesadaran, (h) keamanan sekolah, (i) memantau kemajuan siswa, (j) memberikan inspirasi dan peran model. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### e. Kapasitas Pelaksana

Untuk mengetahui kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SDN 1 ini sangat bagus dan berkualitas, kemampuan dan kesiapan sekolah sangat mendukung, guru, staf, dan seluruh komunitas sekolah untuk mengelola, mendukung, dan mengintegrasikan kurikulum baru ini dalam sistem pendidikan mereka juga sangat mendukung kapasitasnya. Sekolah berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas adalah kunci untuk kesuksesan implementasi kurikulum yang baru saat ini. Sekolah sudah memberikan pelatihan yang memadai kepada guru tentang kurikulum merdeka, termasuk pemahaman mendalam tentang filosofi, tujuan, dan metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum Merdeka, ini merupakan modal besar yang dimiliki oleh sekolah dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa: Saya rasa sekolah memiliki kapasitas yang bagus, sekolah berupaya untuk mengembangkan materi ajar dan sumber daya pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam

proses pembelajaran untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka yang sering kali menekankan pembelajaran berbasis teknologi, dalam hal ini sekolah memiliki guru yang rata-rata memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan sangat baik. Guru mampu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses implementasi dan hasil pembelajaran, hal ini membantu mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 21 sudah sangat bagus, mampu dan siap melaksanakannya dengan memiliki berbagai keahlian guru. Mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antara guru-guru, staf sekolah, dan kepala sekolah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Saya sebagai kepala sekolah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka dan saya berkomitmen untuk mendukung implementasinya. Saat ini sekolah memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, seperti buku teks, perangkat pembelajaran, perangkat keras, dan perangkat lunak, yang dibutuhkan untuk mendukung kurikulum Merdeka. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa sekolah memiliki kapasitas yang bagus dan memenuhi standar, hal tersebut terukur dengan terlibatnya orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses implementasi kurikulum merdeka dengan cara menyelenggarakan pertemuan orang tua guru, diskusi komunitas, atau proyek bersama. Menyediakan dukungan psikososial kepada guru dan staf sekolah untuk mengatasi tantangan dan stres yang mungkin muncul selama proses implementasi. Mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan dan kurikulum merdeka, dan siap untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan jika diperlukan. Memfasilitasi keterlibatan guru dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi kurikulum, sehingga mereka merasa memiliki kurikulum tersebut. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa memiliki kapasitas yang baik, hal ini terukur dengan indikator: (a) adanya pelatihan dan pengembangan guru, (b) adanya pengembangan kurikulum lokal, (c) adanya penggunaan teknologi pendidikan, (d) adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, (e) adanya kerja kolaboratif, (f) adanya dukungan kepemimpinan, (g) adanya akses ke sumber daya, (h) adanya pelibatan orang tua dan masyarakat, (i) adanya penyediaan dukungan psikososial, (j) adanya pembaruan terus-menerus, (k) keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan.

#### **Evaluasi Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen**

Untuk mengetahui evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, diukur dengan 7 (tujuh) indikator pertanyaan, yaitu: (a) pencapaian tujuan, (b) efektivitas pelaksanaan, (c) efisiensi pelaksanaan, (d) kesetaraan atau keadilan, (e) partisipasi dan keterlibatan masyarakat, (f) dampak sampingan atau efek tidak terduga, dan (g) keberlanjutan.

##### **a. Pencapaian tujuan**

Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara dengan Miftahul Jannah, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SDN 1 memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Menentukan secara jelas tujuan dan sasaran evaluasi yang ingin dicapai dengan melakukan evaluasi, misalnya, mengukur peningkatan hasil belajar siswa, efektivitas metode pembelajaran, atau pemahaman guru tentang kurikulum merdeka. Kemudian melakukan identifikasi indikator-indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan evaluasi. Indikator ini dapat berupa data hasil tes, observasi pembelajaran, penilaian guru, atau data lain yang relevan. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Tri Wahyuni, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Untuk pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SDN 18, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, ini melibatkan penggunaan berbagai alat evaluasi, seperti tes, kuesioner, wawancara, atau observasi. Analisis data yang telah dikumpulkan mengidentifikasi tren dan temuan yang relevan. Evaluasi dilakukan berfokus pada apa yang telah berjalan baik dan di mana perbaikan diperlukan. Menyelenggarakan pertemuan atau diskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa, untuk membahas hasil evaluasi. Ini membantu dalam

merumuskan pemahaman bersama tentang hasil evaluasi dan mengidentifikasi area perbaikan. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Berdasarkan temuan evaluasi, pihak sekolah membuat rencana tindakan perbaikan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi atau meningkatkan area yang perlu ditingkatkan. Implementasikan tindakan perbaikan yang telah direncanakan, ini dapat mencakup perubahan dalam metode pengajaran, pelatihan guru tambahan, alokasi sumber daya tambahan, atau perubahan kebijakan sekolah. Kemudian memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan hasil yang dicapai, selanjutnya melakukan evaluasi lanjutan untuk memantau perkembangan dan menilai apakah tindakan perbaikan berhasil mencapai tujuan. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa pihak sekolah mempertahankan komunikasi terbuka dan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, orang tua, komunitas, dan pihak-pihak terkait lainnya. membagikan hasil evaluasi dan kemajuan yang telah dicapai dengan semua pemangku kepentingan, hal ini sangat membantu dalam menjaga transparansi dan memastikan partisipasi aktif dari semua pihak. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa (a) identifikasi tujuan evaluasi, (b) mengumpulkan data yang relevan, (c) menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, (d) melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, (e) membuat perencanaan tindakan perbaikan, (f) implementasi tindakan perbaikan, (g) melakukan evaluasi lanjutan, (h) melakukan kolaborasi terus-menerus, (i) melaksanakan pemantauan yang berkesinambungan, dan (j) melakukan publikasikan hasil.

Efektivitas pelaksanaan evaluasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. Evaluasi yang baik akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

b. Efektivitas pelaksanaan,

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sangat efektif dan semua terukur, karena pihak sekolah sudah memastikan ada perencanaan evaluasi yang baik sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka dimulai, merencanakan tujuan evaluasi dengan baik, mempersiapkan metode yang akan digunakan, serta membuat perencanaan indikator pencapaian yang diharapkan. Selama implementasi kurikulum merdeka, kami memastikan bahwa data relevan dikumpulkan secara teratur. Data dapat berupa hasil belajar siswa, partisipasi guru, dan lain-lain. Pengumpulan data kami lakukan dengan sangat akurat dan konsisten. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sangat efektif pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 18, hal ini kami lakukan dengan sangat maksimal pelaksanaannya. Kami melakukan pemantauan dan evaluasi berkala selama implementasi kurikulum merdeka berlangsung, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan para guru, staf sekolah, dan pihak terkait untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Selain itu melakukan identifikasi tren positif dan negatif dalam pencapaian siswa, serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, dan mencari solusinya. (Wawancara: 05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Selama ini sekolah kami sangat efektif pelaksanaannya, hal ini karena terjadi karena semangat kinerja yang dilakukan oleh semua unsur kepentingan di sekolah ini, jika ada kekeurangannya kami selalu melakukan perbaikan dan tindakan korektif, hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dan menindaklanjuti dengan perbaikan dan tindakan korektif, hal ini bisa berarti memberikan pelatihan tambahan kepada guru, mengubah strategi pengajaran, atau menyesuaikan kurikulum jika diperlukan. Kelebihan kami di sini karena adanya keterlibatan semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan komunitas sekolah, dalam proses evaluasi. Pendapat mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas implementasi. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang efektivitas pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sangat efektif pelaksanaannya, hal ini terukur dengan keterlibatan semua unsur dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian sekolah memastikan hasil evaluasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang relevan, mencakup perubahan dalam kebijakan sekolah, anggaran, atau dukungan tambahan kepada guru. Sekolah melaporkan hasil evaluasi secara transparan kepada semua pihak terkait, hal ini akan membantu dalam membangun kepercayaan dan mendukung perbaikan yang diperlukan. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di atas tentang efektivitas pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa sangat efektif pelaksanaan implementasi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Efektivitas pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun terukur dengan komitmen, keterlibatan, dan keseriusan semua pihak terkait. Dengan perencanaan yang baik, pengumpulan data yang akurat, dan tindakan yang sesuai, sekolah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum di sekolah dasar.

c. Efisiensi pelaksanaan,

Untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Agar efisiensi pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1, kami tingkatkan dengan memperhatikan beberapa langkah dan praktik terbaik yaitu, melakukan perencanaan yang tepat, hal ini penting kami lakukan untuk memiliki rencana evaluasi yang terstruktur dan terperinci sebelum implementasi kurikulum merdeka dimulai, melakukan identifikasi tujuan evaluasi yang jelas, metode yang akan digunakan, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi. Penggunaan Sumber Daya dengan efisien, memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran dialokasikan dengan bijak untuk pelaksanaan evaluasi, dan menghindari pemborosan sumber daya yang dapat menghambat efisiensi. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Untuk efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1, maka guru-guru dan staf memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data, sistem otomatisasi dapat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Selain itu menjadwalkan pengumpulan data secara teratur dan sesuai kebutuhan, akan membantu dalam pemantauan yang konsisten dan mendeteksi masalah dengan cepat. Dalam hal pelaksanaan evaluasi melibatkan tim yang terampil dan berkolaborasi dengan baik, setiap anggota tim mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

SDN 21 sudah berupaya semaksimal mungkin agar efisien dalam pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka, banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah ini seperti, memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data evaluasi, guru yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Memastikan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan dan lingkungan sekolah. Instrumen yang tepat akan memberikan hasil yang lebih akurat. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa umumnya SD di Kabupaten Bireuen sangat efisien dalam pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Sekolah selalu melakukan evaluasi diri terhadap proses evaluasi yang digunakan. Melakukan identifikasi peluang perbaikan dan terus-menerus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kurikulum merdeka, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu, jika ada proses birokratis yang tidak memberikan nilai tambah dalam evaluasi, maka sekolah mempertimbangkan untuk mengurangnya atau menyederhanakannya. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa umumnya SD di Kabupaten Bireuen, secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh sekolah sudah sangat efisien. Sekolah merencanakan evaluasi yang terstruktur dan terperinci sebelum implementasi kurikulum merdeka dimulai. Sekolah menggunakan sumber daya dengan efisien. Sekolah

manfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data, dengan sistem otomatisasi dapat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Sekolah melibatkan tim yang terampil dan berkolaborasi dengan baik, setiap anggota tim diberi tahu peran dan tanggung jawab mereka. Instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan dan lingkungan sekolah.

Hasil evaluasi yang digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Sekolah memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data evaluasi secara efektif dan efisien. Guru yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Sekolah selalu melakukan evaluasi diri terhadap proses evaluasi yang digunakan, dan melakukan identifikasi peluang perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya. Selain itu melakukan kebijakan pengurangan birokrasi yang tidak perlu.

d. Kesetaraan atau keadilan,

Untuk mengetahui kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam Pendidikan, di SDN 1 memiliki prinsip dan praktik yang digunakan untuk mencapai kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi, misalnya instrumen evaluasi yang digunakan adil dan mempertimbangkan beragam latar belakang siswa, mempertimbangkan penggunaan variasi instrumen dan pendekatan evaluasi yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka. Memberikan akomodasi khusus kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, hal ini dapat mencakup waktu tambahan, bantuan, atau peralatan khusus untuk menjalani evaluasi. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Tri Wahyuni, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 18, yaitu memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, siswa harus merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, dan sekolah memberikan pelatihan kepada guru dalam mengenali kebutuhan individu siswa dan bagaimana memberikan dukungan kepada mereka dalam evaluasi, guru dapat mengidentifikasi dan merespons perbedaan dalam pemahaman dan kemampuan siswa. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara dengan Nilawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Sekolah ini sebelum IKM sudah menerapkan kesetaraan atau keadilan terhadap siswa, guru, dan staf. SDN 21 memiliki perencanaan kurikulum yang Inklusif, memastikan bahwa kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama implementasi kurikulum merdeka mencerminkan keadilan dan inklusi. Kurikulum dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa, dan sekolah melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum Merdeka. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Nuraini, selaku peserta didik pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Kami sebagai peserta didik merasakan kesetaraan atau keadilan dalam segala hal, sekolah memperlakukan kami sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kami masing, adanya kurikulum baru ini membuat kami belajar lebih menyenangkan, kami belajar banyak hal dengan guru-guru, dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan mata Pelajaran yang diberikan oleh guru. (Wawancara: 13 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah menerapkan diversifikasi metode evaluasi, sekolah menggunakan berbagai metode evaluasi yang mengukur beragam keterampilan dan pengetahuan, ini dapat membantu siswa dengan berbagai bakat dan kemampuan untuk menonjol dalam cara yang berbeda, dan sekolah memberikan akomodasi khusus kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, ini mencakup waktu tambahan, bantuan, atau peralatan khusus untuk menjalani evaluasi. (Observasi: 11 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan tentang kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata sekolah menerapkan kesetaraan atau keadilan dalam melakukan evaluasi, hal tersebut terukur dengan indikator: (a) instrumen evaluasi yang digunakan adil dan mempertimbangkan beragam latar belakang siswa, (b) memberikan akomodasi khusus kepada siswa yang

memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, (c) evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, sehingga siswa merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, (d) memantau proses evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap siswa tertentu, (e) menggunakan berbagai metode evaluasi yang mengukur beragam keterampilan dan pengetahuan siswa, sehingga dapat membantu siswa dengan berbagai bakat dan kemampuan untuk menonjol dalam cara yang berbeda, (f) kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama implementasi kurikulum merdeka mencerminkan keadilan dan inklusi, kurikulum harus dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa, dan (g) sekolah melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum merdeka.

e. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat,

Untuk mengetahui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireun, menyatakan bahwa:

Syukur Alhamdulillah masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 Bireun, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program pendidikan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, sosialisasi program Pendidikan, dimulai dengan menyelenggarakan pertemuan atau seminar untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kurikulum merdeka, tujuannya, dan manfaatnya, informasi disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua anggota masyarakat. Mengundang orang tua siswa ke sekolah, untuk berpartisipasi dalam pertemuan sekolah, baik secara reguler maupun dalam pertemuan khusus yang membahas evaluasi kurikulum Merdeka, agar dapat menjadi forum untuk mendengarkan masukan dan keprihatinan orang tua. (Wawancara: 04 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireun, menyatakan bahwa:

Membentuk komite orang tua yang dapat bekerja sama dengan sekolah dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum merdeka, komite ini dapat memberikan masukan berharga, memantau kemajuan, dan mengadvokasi perubahan jika diperlukan. Survei dan kuesioner untuk mengumpulkan pandangan dan pemikiran masyarakat tentang implementasi kurikulum merdeka, pertanyaan dalam survei dapat mencakup pendapat mereka tentang bagaimana program ini memengaruhi pembelajaran anak-anak mereka. Diskusi terbuka dengan masyarakat setempat untuk membahas hasil evaluasi dan tantangan yang dihadapi, dapat menciptakan ruang bagi orang tua dan warga masyarakat untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memberikan masukan. (Wawancara: 05 September 2023). Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireun,

menyatakan bahwa:

Dukungan teknis kepada orang tua dan masyarakat dalam hal penggunaan data dan informasi evaluasi, mereka memahami cara membaca dan menggunakan hasil evaluasi. Transparansi informasi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, hasil evaluasi, dan rencana tindak lanjut tersedia secara terbuka untuk Masyarakat, dan membuat laporan evaluasi dan informasi relevan lainnya mudah diakses. Pertemuan periodik antara sekolah dan masyarakat untuk membahas perkembangan implementasi kurikulum merdeka dan hasil evaluasi, dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kausar, selaku peserta didik pada UPTD SD Negeri 18 Bireun, menyatakan bahwa:

Masyarakat sangat antusias berpartisipasi dan terlibat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 18 Bireun, seperti halnya orangtua saya, selalu aktif dan hadir setiap pertemuan yang diadakan oleh sekolah, selain itu orangtua saya selalu mengevaluasi terhadap perkembangan saya dalam pembelajaran di sekolah, apa saja yang saya capai selama penerapan kurikulum baru. (Wawancara: 06 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan atau isu-isu pendidikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum merdeka. Penghargaan dan pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi, dapat memberikan insentif kepada orang tua dan masyarakat untuk terus berpartisipasi. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara

umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program Pendidikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, yaitu: (a) melakukan sosialisasi program pendidikan, (b) mengundang orang tua ke sekolah, (c) membentuk komite orang tua, (d) melakukan survei dan kuesioner, (e) melakukan diskusi terbuka, (f) memberikan dukungan teknis, (g) transparansi informasi, (h) melakukan pertemuan periodik, (i) bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan atau isu-isu pendidikan, (j) memberikan apresiasi dan akui kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi.

f. Dampak Sampingan atau Efek Tidak Terduga

Untuk mengetahui dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Miftahul Jannah, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah bisa menghadapi dampak sampingan atau efek tidak terduga, sebagian dampak sampingan ini bisa positif, sementara yang lain bisa negatif. Adapun dampak positif yaitu inovasi pembelajaran yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sedangkan dampak negatif yaitu stres dan tekanan guru, evaluasi yang sangat ketat atau kurang adil dapat menyebabkan stres dan tekanan pada guru, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan pengajaran mereka. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Dampak positifnya yaitu tertanamnya motivasi guru dan siswa, hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, karena mereka merasa pencapaian mereka diakui dan dihargai. Sedangkan dampak negatifnya yaitu fokus pada tes standar, terlalu banyak penekanan pada hasil tes standar dalam evaluasi dapat menyebabkan guru dan siswa hanya fokus pada persiapan untuk tes dari pada pengembangan keterampilan yang lebih luas. (Wawancara: 09 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:

Dampak positifnya yaitu perbaikan kinerja guru, evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja guru, yang pada gilirannya dapat membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mereka. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketidaksetaraan dalam evaluasi, jika evaluasi tidak dilakukan dengan adil, ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam penilaian siswa, terutama jika kurikulum atau instrumen evaluasi tidak memperhatikan kebutuhan beragam siswa. (Wawancara: 10 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa dampak positifnya dapat meningkatkan partisipasi orang tua, jika evaluasi melibatkan orang tua dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan dampak negatifnya yaitu reaksi negatif Masyarakat dan orangtua siswa, jika evaluasi dipandang sebagai kurang adil atau tidak akurat oleh masyarakat, ini dapat menciptakan reaksi negatif dan ketidakpercayaan terhadap sistem Pendidikan. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa dampak positifnya yaitu (a) evaluasi yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, (b) hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, karena mereka merasa pencapaian mereka diakui dan dihargai, (c) evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja guru, yang pada gilirannya dapat membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mereka, (d) jika evaluasi melibatkan orang tua dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: (a) evaluasi yang sangat ketat atau kurang adil dapat menyebabkan stres dan tekanan pada guru, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan pengajaran mereka, (b) terlalu banyak penekanan pada hasil tes standar dalam evaluasi dapat menyebabkan guru dan siswa hanya fokus pada persiapan untuk tes daripada pengembangan keterampilan yang lebih luas, (c) jika evaluasi tidak dilakukan dengan adil, ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam penilaian siswa, terutama jika kurikulum atau instrumen evaluasi tidak memperhatikan kebutuhan beragam siswa, (d) jika evaluasi dipandang sebagai kurang adil atau tidak akurat oleh masyarakat, ini dapat menciptakan reaksi negatif dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.

g. Keberlanjutan.

Untuk mengetahui keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka adalah faktor penting untuk memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan sekali saja, namun menjadi bagian integral dari perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan, untuk memastikan keberlanjutan dalam evaluasi, kami membuat perencanaan jangka panjang, rencana evaluasi yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang mencakup tujuan evaluasi jangka panjang, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke depan. Integrasi evaluasi dalam proses Pendidikan, evaluasi bukan hanya kegiatan terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam siklus pembelajaran dan manajemen sekolah, memasukkan pemantauan dan penilaian terus-menerus dalam proses pengajaran dan manajemen sekolah. (Wawancara: 08 September 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Ernawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:

Terkait dengan keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum Merdeka di SDN 18, yaitu adanya komitmen kepemimpinan kepala sekolah, untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik. Pelatihan dan kapasitas terkait evaluasi kepada guru, staf sekolah, dan pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dengan efektif. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, siswa, dan masyarakat, dalam proses evaluasi, agar menciptakan dukungan yang lebih besar dan mengintegrasikan perspektif beragam dalam evaluasi. (Wawancara: 09 September 2023).

Lain halnya hasil wawancara peneliti dengan Asyifa Nurjannah, selaku peserta didik pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:

Ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 Bireun, diantaranya sekolah melakukan evaluasi berkala terhadap rencana evaluasi, berdasarkan perubahan dalam kurikulum, kebijakan, dan kebutuhan sekolah, bahwa rencana evaluasi tetap relevan dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas internal sekolah untuk melaksanakan evaluasi secara independent, mencakup pelatihan bagi guru atau staf yang bertanggung jawab atas evaluasi. (Wawancara: 13 September 2023).

Hasil observasi peneliti di lapangan tentang keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa adanya dukungan keuangan, yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi. Evaluasi proses dan hasil yang mencakup evaluasi proses penerapan kurikulum dan evaluasi hasil yang di capai oleh siswa mencapai tujuan pembelajaran. (Observasi: 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (a) membuat rencana evaluasi yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang, mencakup tujuan evaluasi jangka panjang, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke depan, (b) integrasi evaluasi dalam proses Pendidikan, (c) komitmen kepemimpinan untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik, (d) memberikan pelatihan terkait evaluasi kepada guru, staf sekolah, dan pengambil kebijakan untuk memastikan guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dengan efektif, (e) melibatkan pemangku kepentingan, (f) hasil evaluasi digunakan secara efektif untuk perbaikan dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah, (g) sekolah menilai diri sendiri dalam hal implementasi kurikulum merdeka dan proses evaluasi digunakan untuk merumuskan rencana perbaikan, dan (h) dukungan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi.

### **Analisis Peneliti**

#### **Analisis Perencanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun.**

Guna memajukan pendidikan di Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat salah satu terobosan baru dengan inisiatif kurikulum terbaru yakni Kurikulum Merdeka Belajar yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsep Merdeka Belajar adalah

mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka.

Menurut Purwaningrum, merdeka belajar merupakan langkah tepat mencapai pendidikan ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Merdeka belajar sangat memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka belajar memberi kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri mereka. Selama ini pendidikan lebih menekankan terhadap aspek pengetahuan

Implementasi merupakan usaha dalam menerapkan suatu hal. Implementasi ialah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana. Dalam implementasi kurikulum ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaannya, yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penting untuk dipahami bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka harus didukung oleh ketersediaan sumber daya disetiap satuan jenjang Pendidikan.

Seperti halnya ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, sudah tersedia dengan lengkap sumber dayanya, diantaranya: tersedianya tenaga pendidik dan staf, tersedianya bahan ajar dan materi pembelajaran, tersedianya infrastruktur dan fasilitas, tersedianya teknologi dan perangkat, tersedianya dana atau anggaran, adanya partisipasi orang tua dan masyarakat, melakukan evaluasi dan monitoring, melakukan pengembangan kurikulum lokal, bekerjasama sama dengan pihak terkait, membangun komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*.

Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang berlanjut pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang sesuai perencanaan. Implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain. Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan. Kaitannya dengan implementasi MBKM di lingkungan sekolah tingkat dasar tentu dipengaruhi oleh kurikulum, kelas, peserta didik, guru, hingga pendanaan yang tidak murah. Selain itu membangun koordinasi antar instansi agar maksimal dalam penerapannya.

Selama ini koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah, melakukan koordinasi dengan orang tua dan Masyarakat, melakukan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah, melakukan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur, melibatkan partisipasi guru, melakukan monitoring dan evaluasi bersama, melakukan pemecahan masalah bersama, dan memberikan pemberian dukungan finansial.

Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya pasti akan berjalan dengan baik. Konsep merdeka belajar merupakan konsep yang memberikan kemerdekaan dalam belajar untuk mengusahakan kesiapan lulusan dari sekolah dasar negeri maupun swasta agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Menurut Nadiem Makariem, inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Untuk itu sangat dibutuhkan guru-guru yang berkompeten dalam penerapan kurikulum Merdeka, oleh sebab itu guru dan staf di sekolah perlu diberikan penguatan kapasitas.

Penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, sudah dilakukan yaitu: (a) penguatan pelatihan dan pengembangan guru, (b) penguatan sumber daya kurikulum, (c) penguatan kolaborasi dan konsultasi, (d) penguatan pemantauan dan evaluasi, (e) penguatan dukungan administratif, (f) penguatan pengembangan kepemimpinan, (g) penguatan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, dan (h) penguatan pelibatan *stakeholder*. Penguatan kapasitas dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Sekolah Dasar dapat berhasil menjalankan kurikulum merdeka dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Kurikulum merdeka dirasa menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan semangat belajar siswa serta untuk mengembangkan kompetensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka, yaitu fokus terhadap materi esensial (literasi dan numerasi). Dengan begitu, siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik. Agar semakin optimal dalam menerapkan kurikulum merdeka maka harus mengetahui karakteristik kurikulum Merdeka oleh setiap jenjang sekolah, dan sekolah harus mampu mengukur kinerja dalam implementasinya.

Pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: (a) mengidentifikasi indikator kinerja utama, (b) penetapan target, (c) pemantauan berkala, (d) pengumpulan data, (e) analisis data, (f) evaluasi proses pengajaran, (g) konsultasi

*stakeholder*, (h) perbaikan dan penyesuaian, (i) laporan dan komunikasi, (j) pelatihan dan pengembangan, (k) pelibatan komunitas, dan (l) evaluasi berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang efektif dalam implementasi Kurikulum Merdeka akan membantu sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini.

Implementasi kurikulum merdeka belajar kedudukannya sebagai kurikulum nasional pada hakikatnya sama dengan penerapan kurikulum sebelumnya, namun yang berbeda dalam penerapannya bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka lebih diarahkan kepada pendidikan pancasila yang melahirkan berkompeten, berkarakter, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, sehingga dalam perwujudan implementasi kurikulum merdeka, menuntut guru untuk secara profesional dan merancang atau mendesai pembelajaran efektif dan menyenangkan. Dalam konteks ini sekolah sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum Merdeka.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, semua elemen pemangku kepentingan terlibat, seperti keterlibatan guru dan staf sekolah, keterlibatan orang tua dan wali murid, dukungan dari komite sekolah, berkolaborasi dengan komunitas belajar, melakukan konsultasi dengan ahli Pendidikan, membuat forum diskusi terbuka, melakukan survei kepuasan dan umpan balik terhadap orang tua, siswa, dan guru secara berkala, transparansi dan komunikasi terbuka. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah elemen kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: penetapan indikator kinerja, hasil yang telah dikumpulkan, evaluasi hasil yang telah dikumpulkan, evaluasi proses pengajaran, survei dan umpan balik terkait kepuasan siswa, pertemuan dan diskusi berkala, perbandingan dengan standar, tindak lanjut dan perbaikan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, dari evaluasi dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan, termasuk di dalam evaluasi cara mengatasi problematika yang muncul. Implementasi tidak hanya sebatas melaksanakan dari sebuah program, tetapi sebelum pelaksanaannya ada perencanaan yang sesuai dengan kurikulum berlaku, tugas selanjutnya melaksanakannya dan pengevaluasian dari hasil evaluasi akan didapatkan keputusan apakah rencana tersebut telah sesuai dengan tujuan ataukah melakukan perencanaan ulang lagi.

#### **Analisis Pelaksanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun**

Implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SD mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad-21 dimana pembelajaran mengfokuskan tidak hanya pada ranah pengetahuan tapi juga menekankan pada aspek karakter, penguasaan literasi, keterampilan dan teknologi. Pembelajaran pada kurikulum merdeka akan dikembalikan dalam pendekatan mata Pelajaran, penyusunan jadwal cukup memudahkan guru karena pembagian waktu perminggu menggunakan mata pelajaran. Penyusunan pada kurikulum merdeka berbeda dengan penyusunan jadwal pada kurikulum sebelumnya, dimana harus mempertimbangkan rincian hari efektif dan minggu efektif.

Penerapan kurikulum merdeka belajar masih dilakukan secara bertahap yang artinya baru diterapkan di beberapa kelas dan jenjang pendidikannya yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sistematika dan susunan yang ada dalam kurikulum merdeka belajar ini sebenarnya sangat sederhana dalam penerapannya. Namun dalam perencanaannya perlu kecermatan, dan kecepatan agar saat pelaksanaannya bisa maksimal.

Kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, pelaksanaannya dapat bervariasi yang memengaruhinya, yaitu kesiapan sekolah, pelatihan dan pengembangan guru, dukungan pemerintah dan sumber daya, perubahan budaya dan *mindset*, evaluasi dan penyesuaian, faktor lokal, komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*. Dalam banyak kasus, implementasi kurikulum baru memerlukan waktu untuk adaptasi dan pengembangan. Penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mempercepat pelaksanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireun.

Saat ini Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun sangat konsisten terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka hal ini terukur dengan beberapa indikator yaitu: perencanaan yang matang, mengadakan pelatihan berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi rutin, melibatkan *stakeholder*, menyediakan sumber daya yang konsisten, memiliki pemimpin yang mendukung sepenuhnya implementasi kurikulum merdeka, melakukan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, melakukan penyesuaian dan perbaikan, adanya budaya sekolah yang mendukung, dan adanya pemantauan oleh otoritas pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kurikulum sangat membantu mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka

panjang dan meningkatkan kualitas Pendidikan, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang stabil dan terstruktur bagi siswa.

Dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, sangat baik karena kepala sekolah memiliki visi dan komitmen yang jelas, kepala sekekolah memiliki program pengembangan rencana dan strategi, kepala sekolah memiliki program pelatihan dan pengembangan guru, kepala sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi, kepala sekolah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, kepala sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat, kepala mampu melakukan penyelesaian masalah, kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sangat informatif dan terbuka. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan terlibat, implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireun, maka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membimbing dan memotivasi seluruh komunitas sekolah menuju perubahan positif dalam pendidikan.

Selain itu masyarakat sangat berperan aktif terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, misalnya masyarakat mendukung sekolah, masyarakat menjadi mitra pendidikan, masyarakat memberikan sumber daya, masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat membantu mengevaluasi proses, masyarakat membantu dengan sarana transportasi, masyarakat berkampanye kesadaran tentang pentingnya implementasi kurikulum merdeka, Masyarakat menjaga keamanan sekolah, masyarakat memantau kemajuan siswa, masyarakat memberikan inspirasi dan peran model. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun memiliki kapasitas yang sangat baik terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka, hal ini terukur dengan indikator: (a) adanya pelatihan dan pengembangan guru, (b) adanya pengembangan kurikulum lokal, (c) adanya penggunaan teknologi pendidikan, (d) adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, (e) adanya kerja kolaboratif, (f) adanya dukungan kepemimpinan, (g) adanya akses ke sumber daya, (h) adanya pelibatan orang tua dan masyarakat, (i) adanya penyediaan dukungan psikososial, (j) adanya pembaruan terus-menerus, (k) keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan. Kapasitas yang kuat dalam aspek-aspek ini sangat membantu sekolah SD di Kabupaten Bireun dalam melaksanakan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka dengan sukses dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa.

### **Analisis Evaluasi Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun**

Kepala sekolah memiliki peran penting melakukan evaluasi secara berkelanjutan, memastikan bagaimana program implementasi kurikulum Merdeka berjalan dengan maksimal, pengembangan dan ketercapaian pembelajaran, penggunaan teknologi digital, dan memastikan bahwa seluruh komponen program dijalankan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berikutnya evaluasi dampak kurikulum merdeka pada kualitas pembelajaran yang mencakup penilaian terhadap peningkatan prestasi akademik siswa, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan keterampilan dan kemampuan siswa, serta kepuasan siswa dan guru terhadap program.

Selain itu evaluasi pengembangan guru bertujuan untuk mengetahui relevansi materi pelatihan, metode pengajaran yang diterapkan dalam kelas, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar. Evaluasi dukungan infrastruktur dan sumber daya evaluasi ini perlu dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, akses ke teknologi pendidikan, perpustakaan, laboratorium, dan sumber belajar dapat mendukung implementasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi umpan balik dari *stakeholder* yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan umpan balik terkait dengan implementasi kurikulum merdeka belajar.

Umpan balik dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok. Evaluasi akan memberikan perspektif yang beragam tentang keberhasilan dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya kepala sekolah juga menyampaikan bahwa evaluasi dalam kurikulum merdeka belajar dilakukan secara berkelanjutan dan holistik. Khusus evaluasi koordinasi dan implementasi program merdeka belajar. Untuk memastikan bahwa seluruh komponen program dijalankan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sangat penting.

Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun untuk pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka, melakukan beberapa Langkah, diantaranya identifikasi tujuan evaluasi, mengumpulkan data yang relevan, menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, membuat perencanaan tindakan perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, melakukan evaluasi lanjutan, melakukan kolaborasi terus-menerus, melaksanakan pemantauan yang berkesinambungan, dan melakukan publikasikan hasil. Efektivitas pelaksanaan evaluasi sangat penting dalam

meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun. Evaluasi yang baik akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Selam aini sangat efektivitas pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, hal ini terukur dengan komitmen, keterlibatan, dan keseriusan semua pihak terkait. Dengan perencanaan yang baik, pengumpulan data yang akurat, dan tindakan yang sesuai, sekolah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum di sekolah dasar. Mengevaluasi dan memperhatikan sejauh mana fasilitas yang digunakan mendukung pelaksanaan program ini.

Efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, bahwa upaya yang dilakukan oleh sekolah sudah sangat efisien. Sekolah merencanakan evaluasi yang terstruktur dan terperinci sebelum implementasi kurikulum merdeka dimulai. Sekolah menggunakan sumber daya dengan efisien. Sekolah memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data, dengan sistem otomatisasi dapat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Sekolah melibatkan tim yang terampil dan berkolaborasi dengan baik, setiap anggota tim diberi tahu peran dan tanggung jawab mereka. Instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan dan lingkungan sekolah.

Hasil evaluasi yang digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Sekolah memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data evaluasi secara efektif dan efisien. Guru yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Sekolah selalu melakukan evaluasi diri terhadap proses evaluasi yang digunakan, dan melakukan identifikasi peluang perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya. Selain itu melakukan kebijakan pengurangan birokrasi yang tidak perlu.

Umumnya Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun menerapkan kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka, hal tersebut terukur dengan indikator: (a) instrumen evaluasi yang digunakan adil dan mempertimbangkan beragam latar belakang siswa, (b) memberikan akomodasi khusus kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, (c) evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, sehingga siswa merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, (d) memantau proses evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap siswa tertentu, (e) menggunakan berbagai metode evaluasi yang mengukur beragam keterampilan dan pengetahuan siswa, sehingga dapat membantu siswa dengan berbagai bakat dan kemampuan untuk menonjol dalam cara yang berbeda, (f) kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama implementasi kurikulum merdeka mencerminkan keadilan dan inklusi, kurikulum harus dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa, dan (g) sekolah melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum merdeka.

Masyarakat sangat berpartisipasi dan terlibat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program Pendidikan, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, yaitu: (a) melakukan sosialisasi program pendidikan, (b) mengundang orang tua ke sekolah, (c) membentuk komite orang tua, (d) melakukan survei dan kuesioner, (e) melakukan diskusi terbuka, (f) memberikan dukungan teknis, (g) transparansi informasi, (h) melakukan pertemuan periodik, (i) bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan atau isu-isu pendidikan, (j) memberikan apresiasi dan akui kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi.

Dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, bahwa dampak positifnya yaitu (a) evaluasi yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, (b) hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, karena mereka merasa pencapaian mereka diakui dan dihargai, (c) evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja guru, yang pada gilirannya dapat membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mereka, (d) jika evaluasi melibatkan orang tua dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: (a) evaluasi yang sangat ketat atau kurang adil dapat menyebabkan stres dan tekanan pada guru, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan pengajaran mereka, (b) terlalu banyak penekanan pada hasil tes standar dalam evaluasi dapat menyebabkan guru dan siswa hanya fokus pada persiapan untuk tes daripada pengembangan keterampilan yang lebih luas, (c) jika evaluasi tidak dilakukan dengan adil, ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam penilaian siswa, terutama jika kurikulum atau instrumen evaluasi tidak memperhatikan kebutuhan beragam siswa, (d) jika evaluasi dipandang

sebagai kurang adil atau tidak akurat oleh masyarakat, ini dapat menciptakan reaksi negatif dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.

Keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: (a) membuat rencana evaluasi yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang, mencakup tujuan evaluasi jangka panjang, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke depan, (b) integrasi evaluasi dalam proses Pendidikan, (c) komitmen kepemimpinan untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik, (d) memberikan pelatihan terkait evaluasi kepada guru, staf sekolah, dan pengambil kebijakan untuk memastikan guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dengan efektif, (e) melibatkan pemangku kepentingan, (f) hasil evaluasi digunakan secara efektif untuk perbaikan dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah, (g) sekolah menilai diri sendiri dalam hal implementasi kurikulum merdeka dan proses evaluasi digunakan untuk merumuskan rencana perbaikan, dan (h) dukungan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi.

## 5. KESIMPULAN

Perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu upaya ketersediaan sumber daya, diantaranya: (a) tersedianya tenaga pendidik dan staf, (b) bahan ajar dan materi pembelajaran, (c) infrastruktur dan fasilitas, (d) teknologi dan perangkat, (e) dana dan anggaran, (f) partisipasi orang tua dan masyarakat, (g) evaluasi dan monitoring, (h) pengembangan kurikulum lokal, (i) kerja sama dengan pihak terkait, (j) komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*.

Pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu sekolah memiliki visi dan komitmen yang jelas, sekolah memiliki program pengembangan rencana dan strategi, sekolah memiliki program pelatihan dan pengembangan guru, sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi, sekolah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat, mampu melakukan penyelesaian masalah, sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sangat informatif dan terbuka. Dukungan kepemimpinan yang kuat dan terlibat, implementasi kurikulum merdeka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: (a) identifikasi tujuan evaluasi, (b) mengumpulkan data yang relevan, (c) menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, (d) melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, (e) membuat perencanaan tindakan perbaikan, (f) implementasi tindakan perbaikan, (g) melakukan evaluasi lanjutan, (h) melakukan kolaborasi terus-menerus, (i) melaksanakan pemantauan yang berkesinambungan, dan (j) melakukan publikasikan hasil. Efektivitas pelaksanaan evaluasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun. Evaluasi yang baik akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2007.
- Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K, *Stock Market Response During COVID- 19 Lockdown Period in India: An event study*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (7), 2020.
- Ali Mudlofir dan Masyhudi Ahmad, *Pengembangan Kurikulum*, Surabaya: Revka Petra Media, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beatty, A., Emilie, B., Luhur, B., Menno, P., Daniel, S., *Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia's Learning Profiles Between 2000 and 2014*, International Journal of Educational Development 85 (2021).
- Burhan Nurgianto, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah (Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan)*, Yogyakarta: BPFE, 1988.
- R Fathan, *Hardiknas 2020: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid 19*. Jurnal Pos Media, 2021.
- Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2009.
- Hidayat, Sholeh, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Manab Abdul. *Manajemen Perubahan Kurikulum*, Yogyakarta: Kali Media, 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum, Konsep Implementasi, Evaluasi dan Inovasi*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- S Nasution, *Pengertian Belajar*, Bandung: Bumi Aksara, 2003.

- Nasution, A. K. P., *Integrasi Media Sosial dalam Pembelajaran Generasi Z*. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 2020.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Pasaribu, Veta Lidya Delimah dan Krisnaldy, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Hasil Kinerja Karyawan Kelurahan Pisangan Ciputat*, Prosiding Seminar Nasional, 2020.
- Pritchett, W. L. and Fisher, R. F., *Properties and Management of Forest Soil*, 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York, 1987.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26.